

Konsep Sistem Ekonomi Indonesia

Drs. H. Bambang Hermanto, M.Si.
Mas Rasmini, S.E., M.Si.



PENDAHULUAN

Dalam modul ini akan dibahas tentang konsep dasar sistem ekonomi Indonesia. Secara terperinci pembahasan tersebut akan mencakup hal-hal berikut ini.

1. Sejarah Pemikiran.
2. Konsep Dasar Sistem Ekonomi.
3. Struktur Ekonomi Indonesia.

Pemahaman materi dalam modul ini bermanfaat untuk melengkapi pengetahuan Anda dengan memahami konsep sistem ekonomi Indonesia.

Sesudah mempelajari dengan baik isi modul ini diharapkan Anda dapat menjelaskan:

1. sejarah pemikiran yang meliputi pemikiran sistem ekonomi klasik, pemikiran sistem ekonomi modern, pemikiran sistem ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD`45, pemikiran sistem ekonomi berbasis agama dan budaya;
2. konsep dasar sistem ekonomi Indonesia yang meliputi teori sistem dan teori sistem ekonomi;
3. struktur ekonomi Indonesia yang meliputi pengertian struktur ekonomi, perkembangan ekonomi Indonesia dan ciri negara maju dan berkembang.

Kegiatan Belajar 1

Sejarah Pemikiran dan Konsep Dasar Sistem Ekonomi Indonesia

Dalam Kegiatan Belajar 1 (satu) akan diuraikan secara lebih rinci mengenai asal-muasal munculnya pemikiran-pemikiran dalam menjalankan perekonomian di sebuah negara sehingga perekonomian tersebut bisa berjalan, mulai dari pemikiran sistem ekonomi klasik, pemikiran sistem ekonomi modern, sampai pada muncul pemikiran sistem ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD'45, tidak lupa dibahas juga mengenai pemikiran sistem ekonomi berbasis agama dan budaya. Pemikiran-pemikiran tersebut tidak terlepas dari konsep-konsep dasar sistem ekonomi yang ada di Indonesia di antaranya teori sistem dan teori sistem ekonomi.

A. SEJARAH PEMIKIRAN

Berikut, pemikiran-pemikiran yang muncul dalam perkembangan perekonomian di Indonesia.

1. Pemikiran Sistem Ekonomi Klasik

Salah satu hasil pemikiran kaum klasik telah memelopori pemikiran sistem perekonomian liberal. Dalam pemikiran kaum klasik bahwa perekonomian secara makro akan tumbuh dan berkembang apabila perekonomian diserahkan kepada pasar. Peran pemerintah terbatas kepada masalah penegakan hukum, menjaga keamanan dan pembangunan infrastruktur.

Pemikiran kaum klasik telah menginspirasi "*Washington Consensus*". Berdasarkan "*Washington Consensus*" peran pemerintah di dalam pembangunan lebih dititikberatkan kepada penertiban APBN, dan pemanfaatan/penggunaan kekuatan pasar.

Menurut "*Washington Consensus*" (terdiri dari 10 paket kebijakan ekonomi makro), peran pemerintah dalam pembangunan harus dibatasi dan berorientasi kepada pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Campur tangan pemerintah yang berlebihan dalam perencanaan pembangunan dikhawatirkan menimbulkan "*Government Failure*", seperti birokrasi yang berlebihan, KKN,

dan sebagainya. Membatasi APBN dapat mengurangi defisit karena akan menimbulkan ketidakstabilan di dalam ekonomi.

Pemanfaatan kekuatan pasar, yaitu mengembangkan pasar yang efisien, bebas dari monopoli, oligopoli, dan eksternal diseconomis. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus bersifat “*Market Friendly*”. Suku bunga dan nilai tukar asing harus ditentukan oleh pasar. Harga yang dibentuk pasar dianggap sebagai harga yang sebenarnya. Pasar dianggap lebih efisien daripada pemerintah yang menggarap sektor perekonomian, sehingga perekonomian akan lebih optimal.

Perdagangan luar negeri akan menghasilkan *gains from trade*, aliran FDI yang lebih bebas akan merangsang investor luar negeri untuk menginvestasikan dananya, privatisasi dari BUMN dianggap akan mengefisienkan perekonomian. Oleh karena itu, peran dari pemerintah adalah melakukan deregulasi. Di sini pemerintah ditekankan untuk melindungi *property rights*. IMF (*International Monetary Funds*) dan Bank Dunia yang menganut paham liberal mencoba mengimplementasikan “*Washington Consensus*” dengan cara menggunakan *bargaining power* mereka kepada pemerintahan Indonesia. Pemerintah Indonesia pada tanggal 12 Oktober 2006 secara efektif telah melunasi seluruh pinjaman kepada IMF di bawah skim *Extended Fund Facility*. Dengan lunasnya pinjaman kepada IMF ini berakibat pada hilangnya kekuatan IMF untuk memaksakan “*Washington Consensus*” kepada Indonesia. Dengan pelunasan utang kepada IMF Indonesia sudah tidak berkewajiban lagi mengikuti *post program monitoring* (PPM) dan Indonesia sama dengan anggota IMF lainnya, yang kondisi ekonomi makronya dalam keadaan baik.

Pemikiran perekonomian liberal didasarkan pada pemikiran bahwa pasar sendirilah yang lebih tahu kebutuhannya sehingga pemerintah tidak perlu campur tangan di pasar. Jean Baptiste Say (1767-1832) berpendapat bahwa “*supply creates its own demand*” sehingga tidak akan ada kelebihan produksi. Adam Smith (1723-1790) juga berpendapat bahwa ada “*invisible hands*” yang akan membimbing individu untuk mempromosikan kepentingan masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi semakin terdorong oleh karena buah pemikiran kaum klasik. Perdagangan bebas yang telah diperjuangkan oleh para tokoh klasik mencoba mendobrak tembok proteksionisme ala merkantilisme. Globalisasi membuat batas negara menjadi semakin semu dan pasar menjadi semakin luas. Negara yang memiliki keunggulan kompetitif semakin dapat memperkaya negaranya. Di lain pihak, negara yang tidak siap dalam menghadapi persaingan di pasar global akan semakin terpuruk. Terlepas

dari sisi positif dan negatif dari globalisasi, mau tidak mau setiap negara harus mempersiapkan diri untuk memiliki keunggulan bersaing.

Beberapa tokoh ekonomi klasik seperti Adam Smith (1723-1790), Thomas Robert Malthus (1766-1834), Jean Baptiste Say (1767-1832), David Ricardo (1772-1823), Johan Heinrich von Thunen (1780-1850), Nassau William Senior (1790-1864), Friedrich von Herman, John Stuart Mill (1806-1873), dan John Elliot Cairnes (1824-1875) memperoleh kehormatan dari Karl Marx (1818-1883) atas keklasikan dalam mengetengahkan persoalan ekonomi yang dinilai tidak kunjung lapuk. Berbeda dengan kaum Merkantilis dan Physiokrat, kaum klasik memusatkan analisis ekonominya pada teori harga. Kaum klasik mencoba menyelesaikan persoalan ekonomi dengan jalan penelitian faktor permintaan dan penawaran yang menentukan harga.

John Maynard Keynes (1883-1946) berpendapat bahwa pandangan klasik yang memusatkan perhatian analisis ekonominya pada teori harga maka perlu dipahami arah penggunaan alat produksi dengan sempurna. Dalam hubungan ini maka pengertian klasik diperluas kepada para ahli ekonomi yang tidak menganggap tidak mungkin adanya suatu pengangguran yang tidak dikehendaki (*involuntary unemployment*).

Salah satu hasil pemikiran kaum klasik yang sangat mempengaruhi dunia dalam era globalisasi adalah pemikiran mengenai perdagangan internasional. Pemikiran kaum klasik menentang pemikiran kaum merkantilis yang hanya mementingkan masuknya logam mulia dan berorientasi ekspor dengan meminimumkan impor barang dari luar negeri. Kaum merkantilis meletakkan tekanan pada perdagangan luar negeri. Kaum physiokrat memandang pertanian sebagai sumber segala kemakmuran.

Adam Smith (1723-1790) sebagai tokoh aliran klasik menyatakan pendapatnya dalam bukunya yang berjudul "*Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*", yaitu "Pekerjaan yang dilakukan suatu bangsa adalah modal yang membiayai keperluan hidup rakyat pada asal mulanya, dan dengan hasil-hasil pekerjaan tersebut dapat dibeli keperluan-keperluan hidupnya dari luar negeri." Kapasitas produktif daripada kerja selalu bertambah dikarenakan adanya pembagian kerja yang makin mendasar dan rapi.

Adam Smith (1723-1790) menjelaskan keuntungan adanya pembagian kerja dengan memberikan contoh sebuah pabrik jarum. Di dalam pabrik jarum tersebut seorang buruh secara pasti dapat membuat 20 buah jarum sehari. Dari hasil kunjungan Smith atas suatu pabrik jarum yang telah melakukan pembagian pekerjaan, ternyata 10 orang buruh dapat membuat 48.000 buah jarum, dengan

pembagian pekerjaan, yaitu ada yang khusus menarik kawat, ada yang khusus memotongnya dan ada yang khusus meruncingkan jarumnya, serta lainnya. Dari keadaan tersebut dapat dikemukakan bahwa pembagian pekerjaan yang dilaksanakan itu dapat mempertinggi hasil produksi setiap buruh dari 20 buah menjadi 4800 buah jarum atau meningkatkan sebanyak 240 kali lipat.

Pembagian pekerjaan sering dibedakan menjadi dua pengertian, yang *pertama*, adalah membagi pekerjaan menjadi sederhana sehingga semua buruh dengan tingkat keahlian tertentu dapat melakukan pekerjaan. Pengertian yang kedua adalah pembagian pekerjaan bersusun yang membagi pekerjaan suatu kegiatan produksi menjadi beberapa bagian. Di dalam perkembangannya, konsep pembagian pekerjaan terus berkembang dan terarah kepada kegiatan pekerjaan yang terspesialisasikan, dan di dalam kegiatan produksi yang lebih modern terjadi pembagian pekerjaan sistem ban berjalan ("*conveyor sistem*").

Produksi massal mobil oleh Ford sendiri juga terinspirasi dari konsep pembagian pekerjaan sehingga ongkos produksi semakin murah. Dengan ongkos produksi yang lebih efisien, harga yang ditawarkan dapat lebih kompetitif dengan produk lain. Saat ini, konsep pembagian pekerjaan telah digunakan secara luas di hampir seluruh sektor industri. Keuntungan pembagian pekerjaan, adalah

- a. setiap orang dapat melakukan pekerjaan yang sesuai dengan bakatnya;
- b. dapat meningkatkan pengetahuan di dalam pekerjaan tersebut sehingga lebih mantap;
- c. orang yang bersangkutan mengerjakan pekerjaan yang sama secara berkelanjutan sehingga dapat menghindarkan kehilangan waktu, ini berarti semakin efisien.

Pemikiran mengenai nilai oleh kaum klasik masih relevan dengan perkembangan dunia saat ini. Sebagai contohnya di Indonesia yang memiliki masalah dalam penentuan harga jual beberapa BUMN yang dianggap terlalu murah.

Pandangan Adam Smith (1723-1790) atas konsep nilai dibedakan menjadi 2 yaitu nilai pemakaian dan nilai penukaran. Hal ini menimbulkan paradoks nilai, yaitu barang yang mempunyai nilai pemakaian (nilai guna yang sangat tinggi, misalnya air dan udara, tetapi mempunyai nilai penukaran yang sangat rendah. Malahan boleh dikatakan tidak mempunyai nilai penukaran. Sedangkan di sisi lain barang yang nilai gunanya sedikit tetapi dapat memiliki nilai penukaran yang tinggi, seperti berlian. Hal ini baru diselesaikan oleh ajaran nilai subyektif.

David Ricardo (1772-1823) seorang tokoh aliran klasik menyatakan bahwa nilai penukaran ada jikalau barang tersebut memiliki nilai kegunaan.

Dengan demikian, sesuatu barang dapat ditukarkan bilamana barang tersebut dapat digunakan. Seseorang akan membuat sesuatu barang, karena barang itu memiliki nilai guna yang dibutuhkan oleh orang. Selanjutnya David Ricardo (1772-1823) juga membuat perbedaan antara barang yang dapat dibuat dan atau diperbanyak sesuai dengan kemauan orang, di lain pihak ada barang yang sifatnya terbatas ataupun barang monopoli (misalnya lukisan dari pelukis ternama, barang kuno, hasil buah anggur yang hanya tumbuh di lereng gunung tertentu, dan sebagainya). Dalam hal ini untuk barang yang sifatnya terbatas tersebut nilainya sangat subyektif dan relatif sesuai dengan kerelaan membayar dari para calon pembeli. Sedangkan untuk barang yang dapat ditambah produksinya sesuai dengan keinginan maka nilai penukarannya berdasarkan atas pengorbanan yang diperlukan.

Berikut, David Ricardo (1772-1823) mengemukakan bahwa berbagai kesulitan yang timbul dari ajaran nilai kerja.

- a. Perlu diperhatikan adanya kualitas kerja, ada kualitas kerja terdidik dan tidak terdidik, kualitas kerja keahlian, dan sebagainya. Aliran yang klasik dalam hal ini tidak memperhitungkan jam kerja yang dipergunakan untuk pembuatan barang, tetapi jumlah jam kerja yang biasa dan semestinya diperlukan untuk memproduksi barang. Dari situ maka Carey kemudian mengganti ajaran nilai kerja dengan "teori biaya reproduksi."
- b. Kesulitan yang terdapat dalam nilai kerja itu bahwa selain kerja masih banyak lagi jasa produktif yang ikut membantu pembuatan barang itu, harus dihindarkan. Selanjutnya, David Ricardo (1772-1823) menyatakan bahwa perbandingan antara kerja dan modal yang dipergunakan dalam produksi boleh dikatakan tetap besarnya dan hanya sedikit sekali perubahan.

Atas dasar nilai kerja, dibedakan di samping "harga alami" (*natural price*) ada pula "harga pasaran" (*market price*). Menurut aliran klasik (Adam Smith) "harga alami" akan terjadi bilamana masing-masing warga masyarakat memperoleh kebebasan pilihannya untuk membuat sesuatu produk tertentu yang menurutnya lebih menguntungkan dan menawarkannya bilamana dinilai baik olehnya. Hal ini sejalan dengan pandangan kaum physiokrat. Istilah "harga alami" (*natural price*) yang dikemukakan Smith adalah sama dengan istilah Cantillon "*valeur intrinsique*" (nilai intrinsik), Turgot "*valeur fondamentale*" (harga pokok), Say "*prix reel*" (harga real), Ricardo "*primery/natural/necessary*

price” (harga pokok) dan Cairnes *”normal price*” (harga normal). ”Harga pasaran” dapat berbeda dengan ”harga alami” di mana akan menyesuaikan dengan keadaan penawaran dan permintaan atas barang yang bersangkutan. Demikian pula atas dasar pertimbangan tertentu, adanya peraturan pemerintah yang dapat menghalangi penyesuaian harga alami dengan harga pasaran.

Akan tetapi, bagaimanapun, harga alami akan menjadi acuan (pedoman) atas penetapan harga pasaran. Sebelum Adam Smith menulis bukunya *The Wealth of Nations* (1776), Adam Smith telah menulis filsafat ilmu ekonominya pada tahun 1759 yang berjudul *”The Moral Sentiments.”* Seperti halnya kaum fisiokrat, Adam Smith beranggapan bahwa kepentingan masyarakat dan perorangan secara alami mempunyai persesuaian di mana persesuaian ini diciptakan oleh *”invisible hands.”*

Sedangkan dalam buku *The Wealth of Nations*, Adam Smith menulis antara lain bahwa *”the nature and causes of the wealth of nations is what is properly called political economy”* dan cukup menjelaskan apa yang harus menjadi tujuan ekonomi. Setelah Adam Smith menjelaskan tentang pembagian pekerjaan, pertukaran barang, dan uang sebagai alat untuk memajukan pertukaran barang, selanjutnya memberikan analisis gejala nilai dan harga. Ada tiga komponen harga yaitu upah, sewa tanah dan laba. Kerja itu adalah sebab dan ukuran harga. Adam Smith membedakan antara kerja yang produktif dan kerja yang tidak produktif. Kerja produktif adalah kerja yang menghasilkan barang secara fisik nyata dan kerja yang tidak produktif adalah kerja yang tidak menghasilkan barang secara fisik nyata. Pentingnya menyimpan dinilai sebagai kewajiban dan sekaligus sebagai kebijakan untuk memperbanyak roti yang menjadi pokok keagamaan. Dalam hubungan ini Paul Leautaud mendefinisikan pengertian menyimpan *”l’conomie c’est l’art de ne pas vivre.”*

Pendapat Adam Smith mengenai sewa tanah adalah salah satu faktor yang menetapkan harga. Selanjutnya juga dikemukakan bahwa sewa tanah adalah akibat dan bukan sebab daripada tingginya harga hasil pertanian. Adam Smith tidak mengadakan perbedaan antara bunga modal dan untung pengusaha, sedangkan Jean Baptiste Say (1767-1832) membagi *”profit de l’entrepreneur de l’industrie”* (laba pengusaha).

Upah mereka menyerahkan kekayaan untuk keperluan industri (jadi kaum kapitalis), penggantian *”service capitaux.”* Upah bagi pemilik tanah untuk *”service foncier.”* Penggantian untuk *”service industrial”* yang diperoleh oleh pemimpin proses produksi.

David Ricardo (1772-1823) menyatakan bahwa pembagian pendapatan masyarakat merupakan soal terpenting daripada soal ilmu ekonomi. Jikalau kaum physiokrat menerangkan tentang sewa tanah ada dikarenakan kapasitas produktif daripada tanah, sedangkan menurut Ricardo (1772-1823) sewa tanah timbul karena keterbatasan (kekurangan) tanah. Teori sewa tanah Ricardo (1772-1823) dikenal dengan "Teori Sewa Tanah Diferensial" teori ini menyatakan bahwa pada tahap awal orang akan menggunakan tanah yang subur, dan karena keterbatasannya maka selanjutnya akan menggunakan tanah yang kurang subur. Masing-masing memiliki sewa tanah yang berbeda-beda. Sewa tanah adalah ganti rugi yang harus dibayar kepada pemilik tanah untuk pemakaian "*Original and indestructible powers of the soil.*"

Sedangkan Johan Heinrich von Thunen (1780-1850) menyatakan perbedaan tinggi rendahnya sewa tanah akibat perbedaan letak terhadap pasar penjualannya. Semakin dekat letak tanah dengan pasar produk yang dihasilkan maka akan menekan/mengurangi biaya angkut produknya ke pasar. Akibatnya sewa tanah tersebut relatif lebih tinggi daripada tanah yang letaknya lebih jauh dari pasar.

Mengenai kemiskinan, David Ricardo (1772-1823) dan Thomas Robert Malthus (1766-1834) mengemukakan bahwa kemiskinan penduduk adalah disebabkan "kesalahan sendiri" karena tidak membentuk keluarga kecil. Hal ini dianggap sebagai perlawanan dari undang-undang orang miskin (*poor law*) yang saat itu berlaku di Inggris. Menurut Ricardo (1772-1823) undang-undang tersebut tidak akan memperbaiki kemiskinan, sebaliknya hanya mengurangi kemakmuran si miskin dan si kaya keduanya. Pendapat ini terutama timbul dari teori "dana upah" yang sebelumnya telah diketengahkan oleh Cantillon, Turgot, dan Smith.

Menurut teori ini permintaan tenaga kerja akan tergantung pada dana upah yang terakumulasi, dari "*funds which are destined for the payment of wages*" yang dihematkan, dan tiap jumlah uang yang dibayarkan kepada yang satu, dengan sendirinya dikurangi dari yang lain. Itulah sebabnya bahwa bantuan kepada orang miskin adalah merugikan dana upah, jadi juga upah-upah kerja lainnya.

Menurut Nasau William Senior besarnya upah rata-rata, tergantung pada perbandingan antara jumlah yang disediakan para pengusaha bagi pembayaran upah, dan jumlah pekerja, pendapat serupa ini terdapat pula pada Stuart Mill. Namun, teori dana upah ini adalah suatu pengulangan kata yang tak berarti; tidak ada yang dikemukakan selain hal, bahwa upah rata-rata sama dengan dana

upah, dibagi dengan jumlah pekerja dan sebaliknya dana upah itu harus dapat diketahui dari hasil kali upah rata-rata dengan jumlah orang upahan. Jika Ricardo (1772-1823) mengatakan bahwa dalam hal pertanian, pertambangan dan produksi industri, barang-barang dipertukarkan dalam bandingan jumlah kerja, yang dipergunakan untuk pembuatannya dalam keadaan marginal maka profit sekarang dapat dipandang sebagai ganjaran, biarpun ia tidak banyak menaruh perhatian terhadap residu ini. Rangkuman prognosa Ricardo (1772-1823) tentang pembagian penghasilan masyarakat dapat dirumuskan "rent naik, profit turun, sedangkan upah tetap."

Tentang profit yang menurun sehingga merupakan suatu tendensi penurunan, disambut oleh Marx (1818-1883) dengan pernyataannya yang dianggap sebagai bukti untuk menerangkan keruntuhan kapitalisme. Sedangkan menurut Keynes sebaliknya menggunakannya untuk menunjukkan perlunya politik konjungtur (*business cycle*) tertentu. Sedangkan bagi Ricardo (1772-1823) cukup dijelaskan bahwa pengusaha-pengusaha yang pertama atau lebih awal di dalam merealisasikan pendapat barunya (*invention*) akan memperoleh premi kedahuluan, sedangkan pengusaha yang belakangan akan memperoleh bagian yang relatif kecil. Hal mana sejalan dengan teori keuntungan pengusaha yang dinamis yang diketengahkan oleh Joseph Schumpeter.

Atas dasar pemikiran kaum klasik mengenai profit yang menurun, negara barat berlomba-lomba untuk "menjual" penemuan dan rela untuk membiayai penelitian. Bagi Indonesia sendiri, penelitian dianggap sebagai suatu biaya yang akan terbuang percuma, sehingga Indonesia terus ketinggalan karena tidak pernah memperoleh premi kedahuluan dan hanya memperoleh bagian yang kecil atas produksi produk teknologi lama.

Perdagangan sudah menjadi isu penting sejak zaman para filsuf yang mempermasalahkan apakah perdagangan itu secara moral diterima atau tidak. Kaum merkantilis mengangkat citra perdagangan walaupun masih sebatas memperbanyak logam mulia masuk ke dalam suatu negara (berorientasi ekspor). Kaum klasik mencoba menjelaskan keuntungan dari kerja sama perdagangan internasional.

Adam Smith memulai mengajukan teori keuntungan absolut (*absolute advantage*), sedangkan David Ricardo memperbaikinya dengan mengajukan teori keuntungan komparatif (*comparative advantage*). Berbeda dengan pendapat Smith yang mengajukan perdagangan akan menguntungkan apabila suatu negara memperdagangkan barang yang secara mutlak mengunggulkannya. Ricardo berpendapat bahwa suatu negara akan mendapatkan keuntungan dari

perdagangan karena masing-masing pihak mengambil *relative efficient* tenaga kerjanya masing-masing.

Teori perdagangan internasional diketengahkan oleh David Ricardo (1772-1823) yang mulai dengan anggapan bahwa lalu lintas pertukaran internasional hanya berlaku antara dua negara yang di antara mereka tidak ada tembok pabean, serta kedua negara tersebut hanya beredar uang emas. Ricardo (1772-1823) memanfaatkan hukum pemasaran bersama-sama dengan teori kuantitas uang untuk mengembangkan teori perdagangan internasional. Walaupun suatu negara memiliki keunggulan absolut, akan tetapi apabila dilakukan perdagangan tetap akan menguntungkan bagi kedua negara yang melakukan perdagangan.

Teori perdagangan telah mengubah dunia menuju globalisasi dengan lebih cepat. Kalau dahulu negara yang memiliki keunggulan absolut enggan untuk melakukan perdagangan, berkat "*law of comparative costs*" dari Ricardo (1772-1823), Inggris mulai kembali membuka perdagangannya dengan negara lain.

Pemikiran kaum klasik telah mendorong diadakannya perjanjian perdagangan bebas antara beberapa negara. Teori *comparative advantage* telah berkembang menjadi *dynamic comparative advantage* yang menyatakan bahwa keunggulan komparatif dapat diciptakan. Oleh karena itu, penguasaan teknologi dan kerja keras menjadi faktor keberhasilan suatu negara. Bagi negara yang menguasai teknologi akan semakin diuntungkan dengan adanya perdagangan bebas ini, sedangkan negara yang hanya mengandalkan kepada kekayaan alam akan kalah dalam persaingan internasional.

Globalisasi merupakan hal yang tidak terhindarkan lagi. Mau tidak mau, Indonesia harus siap menghadapinya. Kebijakan pemerintah yang salah akan membuat Indonesia semakin terpuruk. Untuk itu, penguasaan teknologi dan pengembangan sumber daya manusia harus diperhatikan.

2. Pemikiran Sistem Ekonomi Modern (Sistem Ekonomi Sosialis)

Pemikiran sistem ekonomi modern dalam hal ini yang dimaksud adalah sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis mempunyai tujuan kemakmuran bersama, filosofi ekonomi sosialis adalah bagaimana mendapatkan kesejahteraan, perkembangan sosialisme dimulai dari kritik terhadap kapitalisme yang pada waktu itu kaum kapitalis atau kaum borjuis mendapat legitimasi gereja untuk mengeksploitasi buruh.

Sistem ekonomi sosialis dilandasi pada pemilikan bersama (kolektivitas) semua faktor produksi sehingga hak milik dan inisiatif ekonomis individu kurang mendapat tempat yang layak. Dalam sistem ekonomi sosialis,

pemerintah sangat berperan untuk menentukan jalannya perekonomian atau umum dikenal sebagai perencanaan terpusat atau *centralized planning*. Sistem ekonomi sosialis mengalami tahap-tahap perkembangan dan penyesuaian, mulai dari awal berkembangnya gagasan sosialisme utopis pada abad 16 sampai dengan perkembangan mutakhir munculnya sistem ekonomi pasar sosialis. Berkembangnya sistem ekonomi sosialis erat kaitannya dengan kritik terhadap ketimpangan sosial-ekonomi di Eropa (khususnya di Inggris) pada waktu itu.

Polarisasi antara si kaya dan si miskin dalam struktur sosial-ekonomi masyarakat Inggris pada Abad ke 16 memunculkan berbagai kritik, yang konsepnya disebut sebagai “sosialisme utopia”. Gagasan ini merupakan tanggapan langsung pada tahap awal sistematis oleh Adam Smith pada tahun 1776. Tokoh-tokoh penganjur sosialisme utopia di antaranya adalah Thomas More (1478-1535), Tomasso Campanella (1568-1639), Francis Bacon (1560-1626), dan dikembangkan oleh Robert Owen (1771-1858), Charles Fourier (1772-1837), dan Louis Blanc (1811-1882).

Jauh sebelum perkembangan klasik (1750-1914) More, Campanella, dan Bacon sudah merasa kecewa dan prihatin dengan nasib kaum buruh yang makin menderita. Namun, kekecewaan mereka baru sebatas dikonsepsikan dalam wujud pemikiran-pemikiran (khayalan) tentang tatanan kehidupan yang harmonis dan ideal. Thomas More dalam artikelnya *Utopia* menggagas tentang sebuah “Negara impian”, di mana ada suatu komunitas yang tinggal bersama, bekerja bersama “ala kadarnya”, untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup bersama. Karena pemikiran kritis untuk membangun kolektivisme (kebersamaan) yang nampak tidak mungkin diwujudkan pada masa itu, maka pemikiran mereka menandai munculnya konsep sosialisme utopia.

Robert Owen, Charles Fourier, dan Louis Blanc berupaya mengembangkan gagasan-gagasan mereka dengan mencoba mewujudkannya dalam praktek kehidupan nyata. Diawali oleh Robert Owen, seorang pengusaha tekstil di Skotlandia, yang berusaha mengembangkan komunitas pabrik yang manusiawi dan desa-desa (perkampungan) berasas koperasi. Upaya serupa dilakukan oleh Fourier yang berupaya membangun komunitas berasas koperasi yang disebut *phalanx*, yaitu sebuah kompleks apartemen yang dikelilingi daerah pertanian, dihuni oleh 1000-2000 orang yang mencoba memenuhi kebutuhan semua anggota komunitas tersebut. Sementara Louis Blanc berupaya mengembangkan koperasi produksi yang dapat dimiliki oleh buruh pabrik dan mendesak pemerintah untuk memberdayakan ekonomi kaum buruh (Hudiyanto, 2002).

Sosialisme makin berkembang setelah Karl Marx mengajukan teori-teori dan analisis berdasarkan kelemahan sistem kapitalisme yang memperburuk kesejahteraan kaum pekerja. Marx berpendapat bahwa keserakahan merupakan produk dari proses sejarah atau disebut sebagai *materialisme historis*. Dengan sosialisme diharapkan kondisi yang melingkungi hidup manusia bisa berubah sehingga sifat materialistis dan individualistis bisa mengalami perubahan dan manusia menjadi lebih toleran terhadap sesamanya. Pemindehan hak penguasaan faktor produksi dari individu dalam perspektif Marx harus terjadi secara revolusioner, sehingga sosialisme Marx kemudian disebut komunisme.

Karl Marx mengkritik sistem kapitalis sebagai ekonomi yang tidak sesuai dengan aspek kemasyarakatan. Menurut Marx, tidak ada tempat bagi kapitalisme di dalam kehidupan, maka upaya revolusioner harus dilakukan untuk menghancurkan kapitalisme, alat-alat produksi harus dikuasai oleh Negara guna melindungi rakyat. Kritik Marx atas kapitalisme ini diimplementasikan oleh Lenin dalam bentuk institusi Negara. Pada awal mulanya, Lenin mengutarakan beberapa hal yang harus dilakukan untuk menyosialisasikan paham baru kepada masyarakat Rusia setelah jatuhnya pemerintahan lama antara lain: *pertama*, menggunakan propaganda bahwa komunisme adalah partai rakyat; *kedua*, adanya infiltrasi organisasi-organisasi masyarakat, dan *ketiga*, kekerasan, hal itu dilakukan untuk mengembangkan ideologi Lenin dalam masyarakat yang harus dimerdekakan dari penindasan pasar Rusia.

Adapun ajaran dari Marx dalam bidang ekonomi adalah teori:

- a. nilai lebih,
- b. pemusatan (*consentrate theori*),
- c. pemupukan,
- d. pemiskinan,
- e. krisis.

Kelima teori di atas merupakan suatu rangkaian yang saling berhubungan dan merupakan prediksi tentang “evolusi alamiah” kapitalisme menuju sosialisme.

Indonesia memiliki pengalaman sejarah dalam menerapkan sistem ekonomi sosialis (termodifikasi ini), yang disesuaikan dengan sistem nilai dan sistem sosial-budaya masyarakatnya. Hal ini tidak terlepas dari perjuangan untuk meraih kemerdekaan dari pemerintah kolonial Belanda yang menghisap kekayaan bangsa Indonesia. Sejak era monopoli VOC (1600-1800), tanam paksa (1830-1870), akhir pemerintahan kolonial ditandai dengan maraknya perusahaan

besar milik Belanda yang menerapkan sistem kapitalis liberal, yang membawa surplus hasil produksi di Indonesia ke negara asalnya (1870-1945). Pada periode ini Indonesia diperlakukan sebagai negara penyuplai bahan mentah untuk keperluan produksi di negara-negara maju (penjajah), melalui kebijakan-kebijakan politik-ekonomi yang represif, eksploitatif, dan sub-ordinatif.

Dalam Undang-undang Dasar 1994, *founding fathers* kita merumuskan pasal ekonomi (pasal 33) yang menunjukkan corak ekonomi kekeluargaan (kolektivitas dan anti kapitalis-liberal), yang waktu itu dipikirkan sebagai sosialisme (ala) Indonesia. Hal itu termaktub dalam ayat 1-3 yang berbunyi:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- (3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Mengacu pada konstitusi ini, peranan negara sangat besar walaupun tidak menutup peluang swasta dan prakarsa perseorangan. Penyusunan sistem ekonomi Indonesia tidak terlepas dari pengaruh pemikiran Bung Hatta yang banyak menggagas perihail sistem ekonomi sosialis Indonesia. sosialisme dalam pengertian Bung Hatta adalah sosialisme yang dikembangkan atas dasar religiusitas (agama) dan demokrasi (demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial), yang dalam terminologi modern disebut sebagai sosialisme demokratik atau sosialisme religius. Tentu pengertian ini sangat berlainan dengan sistem sosialisme- komunis yang bercorak otoriter dan anti agama (ateis). Hal ini mengindikasikan bahwa *founding father* tidak ingin Indonesia terperangkap ke dalam sistem ekonomi kapitalis (Blok Barat) maupun sistem ekonomi sosialis-komunis (Blok Timur).

Ciri demokrasi ekonomi yang menolak sistem ekonomi kapitalis- liberal, dan condong kepada sistem ekonomi sosialis termodifikasi (ada peran swasta) dalam sistem ekonomi Indonesia yang digagas *founding fathers* termaktub dalam penjelasan pasal 33, yaitu

- (1) Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat.
- (2) Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang.
- (3) Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, bangun usaha yang sesuai untuk itu adalah koperasi.

- (4) Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat banyak ditindasnya.
- (5) Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang seorang.
- (6) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Berkembangnya ajaran komunisme dalam era demokrasi liberal dan kedekatan Indonesia dengan negara-negara komunis (Uni Soviet dan RRC), walaupun dilakukan untuk mengimbangi dominasi negara kapitalis (AS), justru mengubah substansi penerapan sistem ekonomi dalam UUD 1945. Sejak tahun 1959 sistem ekonomi nasional ternyata berkembang menjadi sistem etatistik (serba negara) yang mematikan segala daya kreasi masyarakat. Ekonomi komando (ekonomi terpimpin) berlangsung tujuh tahun (1959-1966) dan mencapai titik paling kritis dengan hiper-inflasi 650% pada tahun 1966, yang hampir-hampir melumpuhkan seluruh sistem produksi dan distribusi nasional (Mubyarto, 2000). Ekonomi terpimpin yang diterapkan tidak sesuai dengan amanat konstitusi dan falsafah dasarnya yang harus mengacu pada prinsip kerakyatan (demokrasi).

Demikian, runtuhnya sistem sosialisme sejak tahun 90-an tidak dapat dianggap bahwa sistem ekonomi kapitalis modern (termodifikasi) yang saat ini dominan memang benar dan tepat bagi semua negara. Berbagai negara sampai saat ini masih menerapkan sistem ekonomi sesuai dengan ciri khas sistem nilai dan sistem sosial budaya masyarakat mereka. Misalnya, China yang walaupun sudah makin terbuka namun tetap mengembangkan sistem sosialis mereka yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Bahkan di beberapa negara tertentu seperti Kuba, Brasil, Korea Utara, sistem ekonomi yang berdasar kolektivisme masih dijalankan. Di negara-negara Islam pun makin berkembang sistem ekonomi Islam yang falsafah dasarnya dengan sistem ekonomi kapitalis.

3. Pemikiran Sistem Ekonomi Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Konsep Sistem Ekonomi Pancasila mulai dikembangkan lebih serius sejak Seminar Nasional di Universitas Gadjah Mada Tahun 1980. Tidak dapat disangkal bahwa hangatnya polemik tentang sistem ekonomi Indonesia sekitar tahun 1980-81 berkisar kepada gagasan Mubyarto mengenai Sistem Ekonomi Pancasila (SEP). Sebutan SEP sebenarnya telah dilontarkan lebih dulu oleh Emil

Salim dalam suatu artikel pada harian Kompas tanggal 30 Juni 1966. Buku “Membangun Sistem Ekonomi” karya guru besar FE UGM ini sekali lagi menegaskan betapa konsistennya Pak Muby, dalam memperkenalkan dan memopulerkan sistem ekonomi yang pas bagi Indonesia. Di kalangan para pelopor SEP terdapat dua cara pandang.

- a. Pertama, jalur yuridis formal, yang berangkat dari keyakinan bahwa landasan hukum SEP adalah pasal 33 UUD 1945, yang dilatarbelakangi oleh jiwa Pembukaan UUD 1945 dan dilengkapi oleh pasal 23, 27 ayat 2, 34, serta penjelasan pasal 2 UUD 1945. Pelopor jalur ini, misalnya adalah Sri-Edi Swasono dan Potan Arif Harahap.
- b. Jalur kedua adalah jalur orientasi, yang menghubungkan sila-sila dalam Pancasila. Termasuk dalam kubu ini adalah Emil Salim, Mubyarto, dan Sumitro Djojohadikusumo.

Pada dasarnya mereka menafsirkan SEP sebagai sistem ekonomi yang berorientasi pada sila I, II, III, IV, dan V. Perbandingan pemikiran ketiga tokoh ini dapat dilihat bahwa ketiganya berusaha menjabarkan ideologi Pancasila dalam dunia ekonomi dan bisnis. Agaknya ini sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan ideologi terbuka, yang artinya nilai dasarnya tetap, namun penjabarannya dapat dikembangkan secara kreatif dan dinamis sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat Indonesia (Alfian, 1991).

Relevansi Ekonomi Pancasila dapat dideteksi dari tiga konteks yang berkaitan, yaitu

- a. cita-cita ideal pendiri bangsa;
- b. praktek ekonomi rakyat;
- c. praktek ekonomi aktual yang menyimpang karena berwatak liberal, individualis, dan kapitalistik.

Relevansi platform ekonomi Pancasila, sebagai media untuk mengenali bekerjanya paham dan moral ekonomi yang berciri neo-liberal kapitalistik di Indonesia. Ekonomi Pancasila merupakan prinsip-prinsip moral (ideologi) ekonomi yang diderivasikan dari etika dan falsafah Pancasila. Oleh karena itu selain berisi cita-cita visioner terwujudnya keadilan sosial, ia juga mengangkat realitas sosio-kultur ekonomi rakyat Indonesia, sekaligus rambu-rambu yang bernilai sejarah untuk tidak terjerumus pada paham liberalisme dan kapitalisme.

Platform pertama ekonomi Pancasila, yaitu moral agama yang mengandung prinsip “roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral.” Pada awalnya, *founding fathers* kita merumuskan politik kemakmuran, keadilan sosial dan pembangunan karakter bangsa yang dilandasi semangat penerapan ajaran moral dan agama. Itu berarti pembangunan harus beriringan dengan pembangunan moral atau karakter bangsa, dan ditujukan untuk menjamin keadilan antar sesama makhluk ciptaan Tuhan, tidak sekedar pembangunan materiil semata. Inilah moral ekonomi rakyat yang tidak sekedar mencari untung, melainkan memperkuat silaturahmi, menegakkan hukum-hukum Allah (Syariah), dan memperhatikan kepentingan sosial. Asalkan tidak malas untuk turun ke desa-desa atau ke pelaku ekonomi rakyat, tidak sulit untuk menemukan praktek ekonomi bermoral ini.

Relevansi platform ekonomi Pancasila dalam hal ini dikuatkan akutnya perilaku ekonomi di Indonesia yang sama sekali mengabaikan moral, etika, bahkan agama. Lihat saja korupsi yang sudah membudaya dan melembaga karena tidak pernah diperhatikan secara serius, kecuali saat-saat terakhir menjelang Pemilu 2004 dengan pembentukan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK). Ada lagi maraknya penjarahan alam berupa penebangan hutan secara liar yang terlalu lama didiamkan sehingga berakibat banjir, tanah longsor, dan kekeringan di sebagian wilayah di Jawa, Sumatera dan pulau lainnya. Yang masih panas-panasnya adalah maraknya porno aksi dangdut erotis, lewat media TV yang memang dibiarkan di alam kebebasan (liberalisme) saat ini. Tanpa peduli moral, agama, dan dampak sosial bagi masyarakat, para penyanyi, produser, perusahaan (iklan), dan stasiun TV, mengeruk rente dari kegiatan ekonomi (bisnis) mereka. Masih ada juga penggusuran orang miskin, pengabaian nasib TKI, dan ribut-ribut soal pesangon atau dana purna bakti DPRD di berbagai tempat. Kondisi itu menegaskan perlunya revolusi moral ekonomi menuju pengejawantahan platform ekonomi Pancasila yang bermoral dan tidak sekuler.

Platform kedua adalah “kemerataan sosial yaitu ada kehendak kuat warga masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial, tidak membiarkan terjadi dan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial.” Gagasan ini sudah lama tertuang dalam bagian penjelasan Pasal 33 UUD 45 yang sudah diamandemen dalam konsep ‘kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang’. Sampai saat ini masih sulit meyakini realisasi semangat tersebut karena setiap upaya memakmurkan ekonomi ternyata yang lebih merasakan dampaknya tetap saja orang besar baik pengusaha ataupun

pejabat pemerintah. Masih saja ketimpangan sosial-ekonomi susah untuk diperkecil. Di puncak piramida yang menguasai mayoritas kue nasional dihuni segelintir manusia. Sebaliknya, di dasar piramida yang kuenya kecil diperebutkan puluhan juta orang (Khudori, 2004).

Zakat yang sudah diformalkan undang-undang dan pajak sebagai instrumen pemerataan ternyata belum bisa mampu banyak, padahal potensi untuk itu sangat besar. Oleh karena itu, kita masih saja berbicara pertumbuhan ekonomi mau 4%, 5%, atau 7%, tanpa berupaya keras memprioritaskan pemerataannya ataupun berusaha sedikit lebih sederhana di tengah kemiskinan yang menjerat kurang lebih 36 juta rakyat Indonesia. Kita dapat belajar pada ekonomi rakyat kita, terutama di perdesaan, yang masih memegang prinsip kebersamaan dan solidaritas sosial-ekonomi dalam kegiatan mereka. Ekonomi Pancasila berfungsi sebagai platform ekonomi yang memperjuangkan pemerataan dan moral kemanusiaan melalui upaya-upaya redistribusi pendapatan.

4. Pemikiran Sistem Ekonomi Berbasis Agama

Kajian pemikiran sistem ekonomi berbasis agama dalam modul ini, penulis membatasi pemaparannya hanya dari pemikiran sistem ekonomi Islam saja.

Sebagai bagian integral dari ajaran Islam, pembahasan mengenai ilmu ekonomi sesungguhnya telah berlangsung sejak diturunkannya Alquran kepada umat manusia. Meski demikian, para ulama tidak pernah mengklaim ekonomi sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri. Klaim “economics as a science” sendiri baru muncul pada Abad 19 oleh Alfred Marshall, sehingga ada kesan seolah-olah ilmu ekonomi itu lahir dan berkembang di Barat, dengan menafikan peran dunia Islam yang sesungguhnya sangat signifikan. Apalagi hal tersebut diperparah dengan tesis Great Gap Analysis Joseph Schumpeter, yang menyatakan bahwa dunia ini berada dalam masa kegelapan selama kurang lebih 5 abad.

Secara umum, periodisasi ilmu ekonomi Islam ini dapat dibagi menjadi tiga tahap besar. *Pertama*, periode klasik ekonomi Islam, yang dimulai sejak misi kenabian Muhammad SAW hingga tahun 1500 M, tepatnya pada masa kejatuhan Andalusia. *Kedua*, periode stagnasi dan transisi, dimulai tahun 1500 M hingga 1950 M. *Ketiga*, periode resurgensi atau kebangkitan kembali, dimulai pada tahun 1950 M hingga sekarang.

Tahap *pertama* adalah fase yang sangat strategis dalam pengembangan ekonomi Islam. Tahap ini merupakan fase perkembangan teori klasik ekonomi Islam, yang dihasilkan selama kurun waktu 9 abad, meski para tokoh ulama

yang muncul di tahap ini tidak menyebutnya sebagai teori ekonomi. Topik-topik yang dibahas pada ilmu ekonomi konvensional modern sesungguhnya telah mendapat pembahasan yang mendalam oleh para tokoh ulama di masa ini, seperti teori tentang uang dan moneter; harga dan pasar; zakat, pajak, dan kebijakan fiskal; pembangunan ekonomi dan peran negara; dan lain-lain.

Sejumlah tokoh ulama terkemuka yang menjadi tulang punggung pengembangan teori klasik ekonomi Islam, antara lain adalah Abu Yusuf, Abu Ubaid, al-Ghazali, Ibn Taimiyyah, Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, Ibn Khaldun, Al-Maqrizi, dan lain-lain. Karya-karya mereka bahkan masih tetap relevan hingga saat ini.

Selanjutnya, tahap *kedua* adalah masa di mana perkembangan ekonomi Islam mulai mengalami stagnasi. Hampir tidak ada hal baru yang berkembang pada periode ini. Pada fase ini, yang menjadi representasi utama kekuatan dunia Islam adalah khilafah Turki Usmani, dengan kontribusi pentingnya adalah menjadikan wakaf tunai sebagai mesin pertumbuhan ekonomi selama kurang lebih lima abad.

Kemudian, kontribusi lain pada tahap ini terkait dengan konsep asuransi takaful atau asuransi syariah. Pada awal Abad 19, seorang fuqoha madzhab Hanafi yang bernama Ibn Abidin (1784 – 1836 M), menjadi tokoh ulama pertama yang membahas secara eksplisit definisi, konsep, dan pola transaksi asuransi yang sesuai dengan syariat Islam. Pembahasan tersebut kemudian diperkuat oleh Muhammad Abduh melalui fatwanya pada awal Abad ke-20. Fase ini juga menjadi saksi tumbuh dan berkembangnya ilmu ekonomi konvensional di daratan Eropa.

Sedangkan tahap *ketiga* adalah tahap kebangkitan kembali ekonomi Islam di pentas dunia. Hingga saat ini, para ekonom Islam masih melakukan proses reformulasi ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu yang mampu menjawab berbagai tantangan ekonomi dunia.

5. Kedudukan Hukum Ekonomi Islam di Indonesia

Dari sudut pandang kesejarahan, jauh sebelum NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dibentuk, bahkan jauh sebelum para penjajah mengangkangi wilayah nusantara – apapun sebutan atau namanya ketika itu –, negeri ini telah dihuni oleh penduduk yang jelas-jelas beragama, khususnya Islam yang kemudian keluar sebagai mayoritas tunggal sampai kini. Sekurangnya di daerah-daerah tertentu, hukum ekonomi Islam dalam konteksnya

yang sangat luas pernah berlaku dan paling tidak sebagian daripadanya masih tetap diberlakukan sampai sekarang ini.

Sistem bagi hasil dalam bentuk parooan/memaro, dan lain-lain dalam bidang pertanian, peternakan, dan sebagainya yang dikenal luas di sejumlah daerah terutama di pulau Jawa, merupakan salah satu bukti konkret bagi keberlakuan atau diberlakukannya hukum ekonomi Islam di nusantara tempo dulu. Demikian pula dengan simbol-simbol transaksi perdagangan di sejumlah pasar tradisional yang terkesan kental dengan mazhab-mazhab fikih yang dikenal masyarakat.

Dari sisi komunitas yang mendiami NKRI, bagian terbesarnya adalah pemeluk agama Islam. Atas dasar ini maka sungguh merupakan kewajiban bila hukum sebuah negara dipengaruhi oleh hukum agama yang dianut oleh bagian terbesar penduduknya. Pemberlakuan hukum ekonomi Islam di Indonesia sama sekali tidak terkait dengan apa yang lazim dikenal dengan sebutan “diktator mayoritas” dan atau “tirani minoritas.” Alasannya, karena penerapan hukum ekonomi Islam tidak dilakukan secara paksa apalagi dipaksakan. Sistem ekonomi Islam termasuk sistem hukumnya berjalan sebanding dan sederajat dengan sistem ekonomi dan sistem hukum ekonomi Konvensional.

Dari sudut pandang kebutuhan masyarakat, kehadiran sistem ekonomi Islam di Indonesia juga disebabkan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Terbukti dengan keterlibatan aktif lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga ekonomi lain yang juga menerima kehadiran sistem ekonomi Syariah. Atau, paling sedikit berkenaan dengan hal-hal ekonomi dan keuangan tertentu, ada kemungkinan bersinergi antara lembaga ekonomi/keuangan Konvensional dengan lembaga ekonomi/keuangan Islam. Demikian juga dengan para pengguna jasa lembaga ekonomi dan atau keuangan Islam. Teramat banyak untuk disebutkan satu persatu nama-nama lembaga keuangan khususnya bank di samping lembaga-lembaga keuangan nonbank lainnya yang secara aktif dan terencana justru membuka atau mendirikan lembaga-lembaga keuangan Syariah.

Di negara hukum Indonesia, kedudukan/posisi hukum ekonomi Islam sesungguhnya sangatlah kuat sebagaimana kedudukan/posisi hukum Islam secara umum dan keseluruhan. Demikian pula dengan signifikansi fungsi/peran hukum ekonomi Islam yang bisa digunakan, terutama dalam upaya menopang, melengkapi dan mengisi kekosongan hukum ekonomi sebagaimana urgensi peran dan fungsi hukum Islam secara umum dan keseluruhan dalam menopang, melengkapi, dan atau mengisi kekosongan hukum nasional.

Kehadiran hukum ekonomi Islam dalam tata hukum Indonesia, dewasa ini sesungguhnya tidak lagi hanya sekedar karena tuntutan sejarah dan

kependudukan (karena mayoritas beragama Islam) seperti anggapan sebagian orang/pihak; akan tetapi, lebih jauh dari itu, juga disebabkan kebutuhan masyarakat luas setelah diketahui dan dirasakan benar betapa adil dan meratanya sistem ekonomi syariah dalam mengawal kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan oleh bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedudukan hukum ekonomi Islam/Syariah akan semakin kuat manakala dihubungkan dengan falsafah dan konstitusi negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Singkatnya, sistem ekonomi syariah sama sekali tidak bertentangan apalagi melanggar Pancasila terutama “Sila Ketuhanan Yang Maha Esa,” juga sama sekali tidak bertentangan apalagi melawan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, baik bagian pembukaan (preamble) yang di dalamnya antara lain termaktub kalimat: “... Dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” maupun dengan bagian isinya terutama yang tertera dalam BAB XI (Agama) Pasal 29 ayat (1) dan (2), serta BAB XIV Pasal 33 dan 34 yang mengatur perihal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial Indonesia.

B. KONSEP DASAR SISTEM EKONOMI

1. Teori Sistem

Apabila kita akan mempersoalkan "sistem", maka terlebih dahulu perlu kita mengenal apa itu sistem, asal muasal kata sistem, dan definisi sistem. Istilah sistem berasal dari kata “sistema” (bahasa Yunani), yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian.

Berikut, akan dikemukakan beberapa definisi sistem yang ada:

"SISTEM". . . An aggregate of related interest or activities. There is the assumption of an organization of parts or phases in orderly arrangement. A philosophy in all its related phases may be so regarded; also a communication or transportation sistem ; or an economic sistem. Whatever the' sistem, its related character is identified by harmony in operation and the integration of its structure". (Henry Pratt Fairchil: 1961)

"SISTEM". . . assemblage of objects arranged after some distinct method, usually logical or scientific; whole scheme of created things regarded as forming one complete whole; universe; organization; classification; set of doctrines or principles; the body as functional unity". (Webster : 1969)

Definisi yang dikemukakan memang bersifat umum tetapi belum banyak memberikan kejelasan tentang arti sistem sebenarnya.

Definisi berikut tentang sistem, lebih sempit lagi dan mempunyai arti khas hingga tidak dapat kita pergunakan untuk membicarakan soal sistem secara umum.

"The sistem". . . The combination of politicians with underworld characters or with businessmen seeking advantage from the public by underhand means". (Edward Conrad Smith and Arnold John : 1966)

"SISTEM". A collection of objects or events conforming to a plan; the plan itself". (Eric L. Kohler : 1972)

Marilah kita selanjutnya memperhatikan definisi dari sistem, sebagai berikut :

"Sekumpulan elemen di antara mana terdapat adanya hubungan-hubungan. Kerap kali dalam literatur dapat diketemukan kata-kata tambahan : elemen-elemen mana ditunjukkan ke arah pencapaian sasaran-sasaran umum tertentu". (Poel; terjemahan)

"Sistem tersusun dari seperangkat komponen yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai semua tujuan dari keseluruhan sistem tersebut".

"Sebuah sistem dapat digambarkan sebagai sebuah kumpulan dari komponen-komponen di mana beberapa dari komponen tersebut saling berhubungan secara tetap dalam jangka waktu tertentu"

Definisi yang dikemukakan dapat lebih dijelaskan dengan contoh berikut.

Sistem	Elemen-elemen	Tujuan/Sasaran
Tubuh Manusia	Organ-organ, kerangka, susunan urat syaraf dan sebagainya.	Homeostase
Perkumpulan rekreasi	Anggota-anggota	Rekreasi bagi Anggota
Perusahaan Produksi	Manusia, mesin-mesin, Gedung-gedung, Bahan-bahan dasar	Produksi barang-barang
Cakrawala	Bintang-bintang, Planet-planet, energi	Tidak jelas
Filsafat	Ide-ide	Mengerti

Sistem	Elemen-elemen	Tujuan/Sasaran
Administrasi Perusahaan Finansial	Buku-buku, Perkiraan-perkiraan, Komputer-komputer, Manusia.	Laporan operasi-operasi Finansial dan nilai daripada Badan Usaha.

Sebuah sistem diuraikan dengan jalan menspesifikasi:

- a. elemen-elemen yang merupakan bagian daripadanya (ELEMEN-ELEMEN SISTEM);
- b. elemen-elemen yang bukan merupakan bagian daripadanya (LINGKUNGAN);
- c. hubungan-hubungan antara elemen-elemen sistem (STRUKTUR INTERN);
- d. hubungan-hubungan antara elemen-elemen sistem dan lingkungan (STRUKTUR EKSTERN).

Tindakan, menetapkan elemen-elemen mana masih tergolong dan tidak lagi tergolong pada sistem yang bersangkutan dinamakan orang "MENETAPKAN SUATU BATAS SISTEM" (*SISTEM BOUNDARY*).

Sebagai contoh tindakan menetapkan sesuatu batas sistem, dapat dikemukakan definisi tentang obyek pengalaman daripada ilmu ekonomi perusahaan seperti dikemukakan oleh J.L. BOUMA:

"Rumah tangga perusahaan merupakan sebuah organisasi produksi yang berdiri sendiri".

Organisasi-organisasi produksi yang tidak berdiri sendiri, merupakan bagian daripada sistem-sistem yang lebih "besar" yang berdiri sendiri.

Jadi "batas sistem" diperluas demikian rupa, hingga terdapat adanya sifat berdiri sendiri.

a. *Persoalan subsistem*

Setiap sistem dianggap terdiri daripada sejumlah "SUBSISTEM", sedangkan setiap subsistem dapat dibagi lagi dalam sejumlah sub-subsistem. Adakalanya orang menggunakan perkataan: BAGIAN - ELEMEN – KOMPONEN untuk istilah SUBSISTEM. Jumlah elemen sebuah subsistem adalah lebih sedikit daripada jumlah elemen sistem, di mana subsistem tersebut merupakan bagian. Hubungan-hubungan antara elemen-elemen subsistem dapat sama dengan hubungan-hubungan yang terdapat pada sistem yang melingkupinya.

Perhatikanlah misalnya sistem ekonomi sebagai sesuatu sistem. Adalah lazim dalam bidang ekonomi teoretika untuk membaginya dalam sektor-sektor (yang dapat juga kita namakan subsistem daripada sistem ekonomi).

RUMAH TANGGA KONSUMSI - RUMAH TANGGA PRODUKSI - RUMAH TANGGA PEMERINTAH.

Apabila kita selanjutnya memperhatikan contoh "MOBIL" sebagai suatu sistem, maka sistem tersebut dapat kita bagi lagi dalam subsistem:

MOTOR – CHASIS – KAROSERI – KABIN – dan sebagainya. Jam tangan sebagai sistem dapat terdiri dari subsistem: MEKANIK JAM – PELAT JAM – dan sebagainya. MEKANIK JAM terdiri dari subsistem PER JAM – SKRUP-SKRUP – dan sebagainya.

Sebuah badan usaha sebagai sistem dapat pula dibagi dalam subsistem-subsistem: bagian administrasi – bagian produksi – bagian penjualan.

Jumlah elemen pada bagian administrasi misalnya adalah lebih kecil dibandingkan dengan jumlah elemen pada sistem "badan usaha" tetapi relasi-relasi antara elemen-elemen subsistem tersebut seperti halnya pada sistem "badan usaha" dapat berhubungan dengan aspek-aspek sosial – finansial – ekonomi – teknis atau politik.

Dengan jalan membagi sesuatu dalam berbagai subsistem dan kemudian mempelajari masing-masing subsistem secara terpisah, kita sebenarnya menerapkan sebuah metode yang dikenal sebagai **metode isolering**, yang merupakan salah satu alat pembantu penting dalam cara "deduksi".

b. Persoalan sistem "Tertutup" dan Sistem "Terbuka" (open and closed systems)

Sebuah sistem terbuka adalah sebuah sistem yang mempunyai hubungan-hubungan (relasi) dengan lingkungan.

Sebaliknya, sebuah sistem tertutup tidak mempunyai relasi dengan lingkungan. Dengan perkataan lain, sebuah sistem terbuka memiliki sebuah struktur ekstern, sedangkan sebuah sistem tertutup tidak memilikinya. Secara khusus, dapat dikatakan bahwa tidak ada sistem-sistem tertutup sedikitnya kita tidak dapat melihatnya/mengamatinya. Oleh karena "mengamati" sudah merupakan sebuah relasi antara elemen-elemen dan sebagian dari lingkungan yakni "pihak yang mengamati".

Jadi, sebuah sistem tertutup bersifat hipotetik: merupakan sebuah alat pemikiran, jadi sebuah "IDEALISASI". Maka oleh karenanya dalam praktek, orang menggunakan "sistem tertutup" dalam arti agak lain. Orang misalnya

mengatakan: "Apabila sebuah sistem tidak mengalami perubahan yang terlihat/kentara, karena relasi-relasi dengan lingkungannya, jadi apabila terdapat "sebab-akibat" tetapi bukan hubungan "pengaruh-mempengaruhi" maka sistem demikian adalah tertutup.

Alasan mengapa kita demikian lama mempersoalkan sistem tertutup adalah bahwa terlampau sering terjadi bahwa orang menganggap sebuah sistem sebagai sistem tertutup, sedangkan timbul bahaya oleh karenanya bahwa dengan demikian salah satu aspek penting sistem tersebut diabaikan. Perbedaan antara "tertutup" dan "terbuka" barulah mempunyai arti apabila kita berbicara tentang "kurang atau lebih" tertutup.

Sebuah partai politik misalnya "kurang tertutup" dibandingkan dengan sebuah lembaga pemasyarakatan ataupun sebuah klinik psikiatris. Sebuah peta daerah merupakan sebuah sistem yang lebih "tertutup", dibandingkan dengan sebuah akuarium. Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa:

"Semakin diperluas batas sistem - maksudnya semakin banyak elemen-elemen yang dimasukkan ke dalamnya, yang semula tergolong pada lingkungan, maka sistem tersebut makin mendekati bentuk sebuah sistem tertutup".

2. Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi adalah suatu susunan dari unsur-unsur ekonomi yang saling berhubungan dan bekerja sama sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu terpenuhinya kebutuhan yang bersifat materi. Sistem ekonomi adalah untuk manusia. Isu pasar untuk komando, sentralisasi dan desentralisasi, perencanaan atau tidak ada perencanaan dan jenis perencanaan yang bagaimana, pengawasan dan jenis pengawasan yang bagaimana, semua isu ini langsung ataupun tidak langsung berisi pertanyaan dasar mengenai hubungan perorangan atau kelompok pada satu pihak dengan kelompok yang lebih besar, masyarakat dan negara dalam hal ini mereka merupakan sebagiannya, pada pihak lain.

Ada macam-macam tafsiran tentang sistem ekonomi atau istilah ekuivalennya orde ekonomi. Definisi berikut sangat singkat sekali:

"Orde ekonomi merupakan organisasi kehidupan ekonomi seperti yang berkembang dalam kerangka data yang ada", definisi tersebut ditekankan sistem atau orde ekonomi sebagai sebuah organisasi. Apabila kita memandangnya sebagai sebuah entitas organisasi, terbukalah kemungkinan-kemungkinan luas untuk meninjau sistem atau orde ekonomi tersebut dari pelbagai sudut organisatorik. Organisasi-organisasi dibentuk oleh manusia oleh karena mereka mengharapakan sejumlah faedah/guna (*utilities*) daripadanya. Dari organisasi-

organisasi, manusia dapat mengharapkan guna atau faedah politik, sosial, religius, estetik, ekonomik, dan sebagainya.

Apabila kita memperhatikan definisi-definisi tentang sistem ekonomi maka di antaranya dapat dikemukakan definisi berikut dari: JOHN F. DUE : "... *Economic sistem ... is the group of economic institutions or regarded as a unit, the economic sistem the organization through the operation of which the various resources, scarce, relative to the need for them are utilized to satisfy the wants of man*".

Definisi Theodore Morgan tentang sistem ekonomi jauh lebih lengkap. Katanya: "... every economic sistem is part of a constellation of economic, sosial and political institutions and ideas and can be understood only as part of this whole".

Dengan berpegang pada definisi Theodore Morgan dapat kita mengisri skema berikut.

Sistem	Elemen-elemen	Sasaran-sasaran Tujuan-tujuan
Sistem Ekonomi	Lembaga-lembaga atau pranata ekonomi, lembaga sosial, lembaga-lembaga politik, ide-ide.	Mengusahakan dan memperlancar proses produksi - distribusi, konsumsi

Sistem ekonomi yang dikenal di dunia adalah sistem ekonomi kapitalis/liberal, dan sosialis. Untuk Indonesia sendiri dikenal juga adanya sistem ekonomi Pancasila, yang dijalankan pada masa orde reformasi, namun demikian sistem ekonomi Pancasila tersebut lebih condong ke arah kapitalistik dengan ideologi liberal. Dewasa ini berkembang kembali yang dinamakan dengan sistem ekonomi Islam, yang ditandai dengan menjamurnya usaha-usaha syariah.

Tujuan dari sistem ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Adapun tugasnya adalah menjawab tiga pertanyaan pokok dalam perekonomian, yaitu

- What? Barang apa yang harus diproduksi?
- How? Bagaimana cara memproduksinya?
- For whom? Untuk siapa barang tersebut?

Sistem ekonomi negara-negara di dunia tidaklah sama. mereka menerapkan sistem yang sesuai dengan situasi dan kondisi negaranya masing-masing.

Sistem ekonomi Indonesia pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi beserta permasalahannya

Sistem ekonomi apa yang diterapkan di Indonesia, kapitalisme, sosialis, atau gabungan dari kedua sistem tersebut. Dalam menjawab pertanyaan ini, Dumairy (1996) menegaskan sebagai berikut: “Ditinjau berdasarkan sistem pemilikan sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi, tak terdapat alasan untuk menyatakan bahwa sistem ekonomi kita adalah kapitalis. Sama halnya, tak pula cukup argumentasi untuk mengatakan bahwa kita menganut sistem ekonomi sosialis. Indonesia mengakui pemilikan individual atas faktor-faktor produksi, kecuali untuk sumber daya-sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara. Hal ini diatur dengan tegas oleh Pasal 33 UUD 1945. Jadi, secara konstitusional, sistem ekonomi Indonesia bukan kapitalisme dan bukan pula sosialis.

Berdasarkan penjelasan di atas maka jelas bahwa untuk memahami sistem ekonomi apa yang diterapkan di Indonesia, paling tidak secara konstitusional (mungkin dalam praktik sehari-harinya sangat berbeda), perlu dipahami terlebih dahulu ideologi apa yang dianut oleh Indonesia. Dalam kata lain, kehidupan perekonomian atau sistem ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari prinsip-prinsip dasar dari pembentukan Republik Indonesia yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945. Seperti yang dijelaskan oleh Sanusi (2000) berikut ini.

“Sistem ekonomi Indonesia yang termasuk sistem ekonomi campuran disesuaikan terutama dengan UUD 1945 sebelum diamandemen tahun 2000, yakni sistem ekonomi Pancasila ... dan ekonomi dengan menitikberatkan pada koperasi terutama pada masa Orde Lama sebelum tahun 1996 dan hingga kini masih berkembang Dan masa pemerintahan Indonesia Baru (1999) setelah berjalannya masa reformasi muncul pula istilah ekonomi kerakyatan. Tetapi ini pun belum banyak dikenal ..., karena hingga kini yang masih banyak dikenal masyarakat adalah sistem ekonomi campuran ... yakni sistem ekonomi Pancasila, di samping ekonomi yang menitikberatkan kepada peran koperasi dalam perekonomian Indonesia”.

Hal tersebut diperjelas lagi dengan adanya bunyi dalam pertimbangan Presiden Republik Indonesia dalam Undang-undang Penanaman modal asing, yakni “bahwa Pancasila adalah landasan idiil dalam membina: sistem ekonomi Indonesia dan yang senantiasa harus tercermin dalam setiap kebijaksanaan ekonomi”.

Dari semua penjelasan tersebut maka sudah jelas terjawab bahwa sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila (kerakyatan). Namun demikian, pada faktanya setelah penulis melihat beberapa literatur dan artikel bahwa Indonesia selama ini menganut sistem-sistem ekonomi yang berbeda dalam setiap orde pemerintahan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Sistem Ekonomi yang Pernah di Pakai di Indonesia

Masa Pemerintahan	Sistem Ekonomi yang Dipakai	Kelebihan	Kekurangan	Permasalahan yang Timbul
Orde Lama	Sosialis	Adanya kepercayaan diri bangsa Indonesia akan kekuatan yang dimilikinya. Kemandirian Ekonomi.	Kurang diminatinya Indonesia sebagai tempat investasi asing. Terhentinya dana asing.	Penyatuan semua mata uang dan di terbitkan mata uang baru, pengguntungan uang
Orde Baru	Sistem Ekonomi pada masa ini lebih ke kapitalistik, di mana Indonesia mulai terbuka dengan dunia Internasional.	Investor asing mulai mau menanamkan modal di Indonesia lebih berkembang dalam hubungan Bilateral dan Multilateral.	Pembangunan ekonomi sangat tergantung kepada utang luar negeri sebagai soko guru. Bertambahnya kesenjangan sosial, karena perbedaan pendapatannya yang tidak merata antara kaya dan miskin	Dari masa ini muncullah budaya KKN yang hingga kini makin meluas, dan juga masa krisis multidimensi yang di mulai dari devaluasi nilai Bath Thailand dan Peso Filipina yang merambat hingga negara Asia termasuk Indonesia Penyelesaian utang Luar negeri Gerakan

Masa Pemerintahan	Sistem Ekonomi yang Dipakai	Kelebihan	Kekurangan	Permasalahan yang Timbul
				reformasi 1998
Orde Reformasi	kerakyatan Pancasila tapi lebih condong ke arah Kapitalistik,dengan ideologi liberalisme.	Persaingan usaha yang terbuka(bebas) Kerja sama dengan luar negeri makin terbuka	Maraknya kenaikan harga pokok, karena faktor kesepakatan Multilateral dan kondisi pasar dunia. Adanya kesenjangan kelas sosial di masyarakat. Adanya pemupukan modal dan akumulasi di masyarakat.	Permasalahan yang timbul pada sistem ekonomi di era reformasi adalah perdagangan bebas negara ASEAN dan China (ACFTA) Dari sini timbul persaingan yang tidak sama kuat antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha dari Luar yang notabene merupakan para industri besar

Sistem Ekonomi Indonesia sangat bergantung atau dipengaruhi oleh sistem politik yang tengah berkembang. Pada Orde Lama Indonesia diarahkan pada kemandirian ekonomi, guna menghindari kondisi ketergantungan terhadap luar negeri. Sedangkan di masa Orde Baru Indonesia memakai sistem ekonomi kapitalistik, yang membawa ragam implikasi terhadap perekonomian Indonesia. Pada masa Reformasi Indonesia menggunakan sistem ekonomi kerakyatan Pancasila yang condong ke arah kapitalis. Hal ini menyebabkan Indonesia harus tunduk pada kapitalisme global.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan secara singkat sejarah pemikiran sistem-sistem ekonomi yang sudah Anda pelajari, mulai dari pemikiran klasik sampai dengan pemikiran sistem ekonomi Islam!
- 2) Uraikan mengenai pengertian-pengertian sistem (beserta contohnya) dan sistem ekonomi!
- 3) Jelaskan sistem-sistem ekonomi yang dipakai di Indonesia beserta permasalahannya!

Petunjuk Jawaban Latihan

Anda diminta menjelaskan dengan ringkas latihan ini dalam sebuah kertas kerja/buku catatan.



RANGKUMAN

Sistem ekonomi yang dibahas di antaranya sistem ekonomi klasik (kapitalis), sistem ekonomi modern (sosialis), sistem ekonomi Pancasila dan sistem ekonomi berbasis agama (Agama Islam).

Salah satu hasil pemikiran kaum klasik telah memelopori pemikiran sistem perekonomian liberal. Dalam pemikiran kaum klasik bahwa perekonomian secara makro akan tumbuh dan berkembang apabila perekonomian diserahkan kepada pasar. Peran pemerintah terbatas kepada masalah penegakan hukum, menjaga keamanan dan pembangunan infrastruktur.

Pemikiran kaum klasik ini telah menginspirasi "*Washington Consensus*". Berdasarkan "*Washington Consensus*" peran pemerintah di dalam pembangunan lebih dititikberatkan kepada penertiban APBN, dan pemanfaatan/penggunaan kekuatan pasar.

Pemikiran sistem ekonomi modern dalam hal ini yang dimaksud adalah sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis mempunyai tujuan kemakmuran bersama, filosofi ekonomi sosialis adalah bagaimana mendapatkan kesejahteraan, perkembangan sosialisme dimulai dari kritik

terhadap kapitalisme yang pada waktu itu kaum kapitalis atau kaum borjuis mendapat legitimasi gereja untuk mengeksploitasi buruh.

Sistem ekonomi sosialis dilandasi pada pemilikan bersama (kolektivitas) semua faktor produksi, sehingga hak milik dan inisiatif ekonomis individu kurang mendapat tempat yang layak. Dalam sistem ekonomi sosialis, pemerintah sangat berperan untuk menentukan jalannya perekonomian atau umum dikenal sebagai perencanaan terpusat atau *centralized planning*. Sistem ekonomi sosialis mengalami tahap-tahap perkembangan dan penyesuaian, mulai dari awal berkembangnya gagasan sosialisme utopis pada abad 16 sampai dengan perkembangan mutakhir munculnya sistem ekonomi pasar sosialis. Berkembangnya sistem ekonomi sosialis erat kaitannya dengan kritik terhadap ketimpangan sosial-ekonomi di Eropa (khususnya di Inggris) pada waktu itu.

Konsep Sistem Ekonomi Pancasila mulai dikembangkan lebih serius sejak Seminar Nasional di Universitas Gadjah Mada Tahun 1980. Tidak dapat disangkal bahwa hangatnya polemik tentang sistem ekonomi Indonesia sekitar tahun 1980-81 berkisar kepada gagasan Mubyarto mengenai Sistem Ekonomi Pancasila (SEP). Sebutan SEP sebenarnya telah dilontarkan lebih dulu oleh Emil Salim dalam suatu artikel pada harian Kompas tanggal 30 Juni 1966. Buku “Membangun Sistem Ekonomi” karya guru besar FE UGM ini sekali lagi menegaskan betapa konsistennya Pak Muby, dalam memperkenalkan dan memopulerkan sistem ekonomi yang pas bagi Indonesia. Di kalangan para pelopor SEP terdapat dua cara pandang.

1. Pertama, jalur yuridis formal, yang berangkat dari keyakinan bahwa landasan hukum SEP adalah pasal 33 UUD 1945, yang dilatarbelakangi oleh jiwa Pembukaan UUD 1945 dan dilengkapi oleh pasal 23, 27 ayat 2, 34, serta penjelasan pasal 2 UUD 1945. Pelopor jalur ini, misalnya adalah Sri-Edi Swasono dan Potan Arif Harahap.
2. Jalur kedua adalah jalur orientasi, yang menghubungkan sila-sila dalam Pancasila. Termasuk dalam kubu ini adalah Emil Salim, Mubyarto, dan Sumitro Djojohadikusumo.

Pada dasarnya, mereka menafsirkan SEP sebagai sistem ekonomi yang berorientasi pada sila I, II, III, IV, dan V. Perbandingan pemikiran ketiga tokoh ini dapat dilihat dalam Tabel 1. Terlihat bahwa ketiganya berusaha menjabarkan ideologi Pancasila dalam dunia ekonomi dan bisnis. Agaknya ini sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan ideologi terbuka, yang artinya nilai dasarnya tetap, namun penjabarannya dapat dikembangkan secara kreatif dan dinamis sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat Indonesia (Alfian, 1991).

Relevansi Ekonomi Pancasila dapat dideteksi dari tiga konteks yang berkaitan, yaitu

1. cita-cita ideal pendiri bangsa;
2. praktik ekonomi rakyat;
3. praktik ekonomi aktual yang menyimpang karena berwatak liberal, individualis, dan kapitalistik.

Secara umum, periodisasi ilmu ekonomi Islam dapat dibagi menjadi tiga tahap besar. *Tahap pertama* adalah fase yang sangat strategis dalam pengembangan ekonomi Islam. Tahap ini merupakan fase perkembangan teori klasik ekonomi Islam, yang dihasilkan selama kurun waktu 9 abad, meski para tokoh ulama yang muncul di tahap ini tidak menyebutnya sebagai teori ekonomi.

Tahap kedua adalah masa di mana perkembangan ekonomi Islam mulai mengalami stagnasi. Hampir tidak ada hal baru yang berkembang pada periode ini. Pada fase ini, yang menjadi representasi utama kekuatan dunia Islam adalah khilafah Turki Usmani, dengan kontribusi pentingnya adalah menjadikan wakaf tunai sebagai mesin pertumbuhan ekonomi selama kurang lebih lima abad.

Tahap ketiga adalah tahap kebangkitan kembali ekonomi Islam di pentas dunia. Hingga saat ini, para ekonom Islam masih melakukan proses reformulasi ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu yang mampu menjawab berbagai tantangan ekonomi dunia.

Setelah kita membahas sejarah pemikiran sistem ekonomi, mari kita kembali untuk mengingat, apa yang dimaksud dengan sistem dan sistem ekonomi dari segi konsep. Definisi dari sistem di antaranya adalah

“Sekumpulan elemen di antara mana terdapat adanya hubungan-hubungan. Kerap kali dalam literatur dapat diketemukan kata-kata tambahan: elemen-elemen mana ditujukan ke arah pencapaian sasaran-sasaran umum tertentu” (Poel; terjemahan).

“Sistem tersusun dari seperangkat komponen yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai semua tujuan dari keseluruhan sistem tersebut”.

“Sebuah sistem dapat digambarkan sebagai sebuah kumpulan dari komponen-komponen di mana beberapa dari komponen tersebut saling berhubungan secara tetap dalam jangka waktu tertentu”

Setiap sistem dianggap terdiri daripada sejumlah "SUBSISTEM", sedangkan setiap subsistem dapat dibagi lagi dalam sejumlah

sub-subsistem. Adakalanya orang menggunakan perkataan: BAGIAN - ELEMEN – KOMPONEN untuk istilah SUBSISTEM. Jumlah elemen sebuah subsistem adalah lebih sedikit daripada jumlah elemen sistem, daripada subsistem tersebut merupakan bagian. Hubungan-hubungan antara elemen-elemen subsistem dapat sama dengan hubungan-hubungan yang terdapat pada sistem yang melingkupinya.

Persoalan lain adalah mengenai sistem terbuka dan sistem tertutup. Sebuah sistem terbuka adalah sebuah sistem yang mempunyai hubungan-hubungan (relasi) dengan lingkungan.

Sebaliknya, sebuah sistem tertutup tidak mempunyai relasi dengan lingkungan. Dengan perkataan lain : sebuah sistem terbuka memiliki sebuah struktur ekstern, sedangkan sebuah sistem tertutup tidak memilikinya. Secara khusus, dapat dikatakan bahwa tidak ada sistem-sistem tertutup sedikitnya kita tidak dapat melihatnya/mengamatinya. Karena "mengamati" sudah merupakan sebuah relasi antara elemen-elemen dan sebagian dari lingkungan, yakni "pihak yang mengamati".

Sistem ekonomi adalah suatu susunan dari unsur-unsur ekonomi yang saling berhubungan dan bekerja sama sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu terpenuhinya kebutuhan yang bersifat materi. Sistem ekonomi adalah untuk manusia. Isu pasar untuk komando, sentralisasi dan desentralisasi, perencanaan atau tidak ada perencanaan dan jenis perencanaan yang bagaimana, pengawasan dan jenis pengawasan yang bagaimana, semua isu ini langsung ataupun tidak langsung berisi pertanyaan dasar mengenai hubungan perorangan atau kelompok pada satu pihak dengan kelompok yang lebih besar, masyarakat dan negara di mana mereka merupakan sebagiannya, pada pihak lain.



TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Bahwa perekonomian secara makro akan tumbuh dan berkembang apabila perekonomian diserahkan kepada pasar. Peran pemerintah terbatas kepada masalah penegakan hukum, menjaga keamanan dan pembangunan infrastruktur. Pemikiran tersebut merupakan pemikiran dari kelompok yang menganut sistem ekonomi
 - A. Islam
 - B. Pancasila
 - C. modern (sosialis)
 - D. klasik (kapitalis)

- 2) Sistem ekonomi yang dilandasi pada pemilikan bersama (kolektivitas) semua faktor produksi, sehingga hak milik dan inisiatif ekonomis individu kurang mendapat tempat yang layak. Sistem ekonomi yang dimaksud adalah sistem ekonomi
 - A. Islam
 - B. Pancasila
 - C. modern (sosialis)
 - D. klasik (kapitalis)

- 3) Salah satu tokoh klasik berpendapat bahwa pandangan klasik yang memusatkan perhatian analisa ekonominya pada teori harga, maka perlu dipahami arah penggunaan alat produksi dengan sempurna. Tokok yang dimaksud adalah
 - A. John Elliot Cairnes
 - B. John Maynard Keynes
 - C. Adam Smith
 - D. Thomas Robert Maltus

- 4) Di bawah ini adalah tokoh-tokoh pencetus sistem ekonomi sosialis, *kecuali*
 - A. John Stuart Mill
 - B. Thomas More
 - C. Tomasso Campanella
 - D. Franscis Bacon

- 5) Di kalangan para pelopor SEP terdapat beberapa cara pandang. Jalur pertama, yang berangkat dari keyakinan bahwa landasan hukum SEP adalah pasal 33 UUD 1945, yang dilatarbelakangi oleh jiwa Pembukaan UUD 1945 dan dilengkapi oleh pasal 23, 27 ayat 2, 34, serta penjelasan pasal 2 UUD 1945. Pelopor jalur ini, misalnya adalah Sri-Edi Swasono dan Potan Arif Harahap. Jalur tersebut disebut juga jalur
 - A. yuridis formal
 - B. orientasi
 - C. yuridis nonformal
 - D. hukum formal

- 6) Secara umum, periodisasi ilmu ekonomi Islam ini dapat dibagi menjadi tiga tahap besar. *Pertama*, periode klasik ekonomi Islam, yang dimulai sejak misi kenabian Muhammad SAW. *Kedua*, periode stagnasi dan transisi. *Ketiga*, periode resurgensi atau kebangkitan kembali. Periode stagnasi terjadi selama rentang waktu

- A. tahun 1500 M
 - B. dimulai tahun 1500 M hingga 1950 M
 - C. dimulai tahun 1950 M hingga 1966 M
 - D. dimulai tahun 1950 M hingga sekarang
- 7) Tujuan dari sistem ekonomi adalah untuk meningkatkan....
- A. pertumbuhan ekonomi suatu negara
 - B. kemakmuran rakyat suatu negara
 - C. kesejahteraan masyarakat suatu negara
 - D. kemakmuran suatu negara
- 8) "*SISTEM*" . . . *assemblage of objects arranged after some distinct method, usually logical or scientific; whole scheme of created things regarded as forming one complete whole; universe; organization; classification; set of doctrines or principles; the body as functional unity*". Yang menyatakan definisi sistem tersebut adalah
- A. Henry Pratt
 - B. Edward Conrad
 - C. Eric L. Kohler
 - D. Webster
- 9) Sistem Ekonomi Indonesia sangat bergantung atau dipengaruhi oleh
- A. budaya masyarakat
 - B. hukum yang berlaku
 - C. sistem pemerintahan yang berjalan
 - D. sistem politik yang tengah berkembang
- 10) Ekonomi Pancasila berfungsi sebagai platform ekonomi yang memperjuangkan
- A. hak rakyat untuk mendapatkan penghidupan yang layak
 - B. pemerataan dan moral kemanusiaan melalui upaya-upaya penyerapan tenaga kerja
 - C. pemerataan dan moral kemanusiaan melalui upaya-upaya redistribusi pendapatan
 - D. sepenuhnya kemakmuran rakyat

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kegiatan Belajar 2

Struktur Ekonomi Indonesia

Dalam Kegiatan Belajar 2 (dua) akan diuraikan secara lebih rinci mengenai struktur ekonomi Indonesia, dimulai dari pengertian struktur ekonomi, kemudian bagaimana perkembangan ekonomi Indonesia beserta ciri negara maju dan berkembang.

A. PENGERTIAN STRUKTUR EONOMI

Struktur ekonomi yang dikenal selama ini ada tiga yaitu agraris, industrial, dan jasa-jasa. Patokan yang menentukan suatu struktur ekonomi di antaranya, adalah jumlah penduduk yang berkecimpung dalam bidang tertentu (mata pencaharian). Apabila lebih dari 50% sebagian besar penduduk berkecimpung di bidang agraris maka struktur ekonomi tersebut adalah struktur ekonomi agraris, begitu juga dengan industrial atau jasa. Contoh di Swiss, struktur ekonominya adalah jasa karena jasa pariwisata dan perbankan(jaminan keamanan rekening) maju. Di Selandia Baru struktur ekonomi agraris, peternakan dominan, sangat maju. Ekspor air bersih ke Arab Saudi. Israel pengeksport bunga ke seluruh dunia. Sangat sulit untuk mengubah struktur perekonomian.

Tafsiran lain tentang istilah "struktur" diberikan oleh D. van der Poel : “Struktur dalam ilmu ekonomi berarti perimbangan kekuatan-kekuatan produksi”. Perubahan-perubahan struktur pada umumnya berarti suatu perubahan kualitatif yang kurang lebih tahan lama sebagai akibat kemajuan teknik, menghilangnya dan munculnya pasaran baru, jalur-jalur lalu lintas, dan sebagainya yang perlu kita bedakan dengan konjungtur, yang menimbulkan perubahan-perubahan kuantitatif dan yang bersifat sementara. Walaupun masih agak prematur, pertanyaan yang kini timbul, adalah "Dapatkah struktur ekonomi sesuatu negara diubah?"

Menurut hemat kami hal tersebut merupakan suatu kemungkinan yang menurut sejarah, terbukti pada pelbagai negara yang dahulu memiliki struktur agraris dan dewasa ini memperlihatkan struktur industrial dan jasa-jasa. Contoh-contoh dalam sejarah seperti misalnya perkembangan dan perubahan struktur ekonomi Amerika Serikat, Belanda, Prancis, Jepang, dan Soviet Rusia merupakan bukti nyata.

Sejarah perubahan struktur perekonomian-perekonomian demikian pada umumnya menunjukkan "pelajaran berharga" bagi kita bahwa pihak pemerintahlah yang merupakan inisiator dan motivator perubahan struktur perekonomian demikian bersama-sama dengan dunia usaha swasta yang mengembangkan diri mereka sebagai "*agent of development*". Ada baiknya untuk membandingkan pengertian struktur ekonomi sesuatu negara dengan sistem ekonomi negara yang bersangkutan.

Sudah tentu, sistem ekonomi dapat kita pandang pula sebagai sebuah sistem (sesuai dengan teori sistem) yang terdiri dari sejumlah subsistem yang lazim kita namakan lembaga-lembaga atau pranata ekonomi (*economic institutions*) yang apabila kita satukan merupakan sistem ekonomi. Struktur ekonomi Indonesia hingga dewasa ini masih menunjukkan ciri-ciri struktur agraris, di mana kurang lebih 2/3 penduduknya masih mencapai nafkah dari bidang pertanian. Kurang lebih tiga perempat dari jumlah penduduk Indonesia masih hidup di desa-desa.

Indonesia terkenal sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 3000 buah pulau; ada pulau kecil ada yang menengah dan ada pula yang relatif besar. Sejak zaman dahulu, iklim Indonesia merupakan iklim tropis yang menurut sejarah merupakan salah satu determinan penting pula bagi struktur agrarisnya. Pulau-pulau yang berpenghuni paling padat, adalah masing-masing: Pulau Jawa, Madura dan Bali. Dua pertiga penduduk tinggal di sana yang sebenarnya hanya merupakan kurang lebih 7% dari seluruh luas darat kepulauan Indonesia.

Kepadatan penduduk pada pulau-pulau tersebut kiranya sudah mencapai titik kulminasi sehingga, sangat mengganggu kelestarian imbalan penduduk dengan faktor-faktor alam, Sudah tentu ada sebab-sebab mengapa kiranya pulau-pulau tersebut demikian padat penduduknya.

Ditinjau dari sudut tanah, maka pulau Jawa, Madura dan Bali tergolong pada pulau-pulau yang memiliki tanah subur. Tanah yang subur sejak zaman dahulu merupakan daya penarik bagi kaum imigran yang berdatangan di pelbagai daerah Asia.

Di pulau Jawa penanaman padi dilakukan di mana-mana dengan cara pengusahaan sawah. Di luar pulau Jawa, tanaman komersial umumnya berupa tanaman untuk tujuan ekspor seperti misalnya: karet, kopi, minyak sawit sedangkan padi dihasilkan dengan jalan teknik berpindah.

Produk Nasional Indonesia terdiri dari hasil industri, hasil tambang minyak, dan mineral, kehutanan dan perikanan yang sebagian besar diekspor.

Sektor-sektor industri, bangunan dan listrik hanya merupakan 10% saja dari seluruh produk nasional, kurang dari setengahnya pada sektor yang sama di

India atau Filipina, dan hanya menyerap 7% dari seluruh angkatan kerja, Sepertiga dari produk nasional dan seperempat dari angkatan kerja sisa-sisa sektor-sektor di atas termasuk dalam sektor jasa-jasa, tidak hanya perdagangan, pengangkutan, pendidikan, dan profesi, tetapi juga jasa-jasa pegawai sipil dan ABRI.

Struktur ekonomi yang kokoh setidaknya ditopang dua fondasi yang kuat. *Pertama*, pada level mikro, relasi antar pelaku ekonomi berpadu padan dalam interaksi yang sejajar sehingga nisbah ekonomi dibagi secara proporsional sesuai dengan pengorbanan yang dipikul. Jika pelaku ekonomi yang memikul ongkos terbesar mendapat nisbah paling kecil, itu menandakan terbentuknya struktur ekonomi yang tidak sehat. *Kedua*, pada level makro, sektor ekonomi yang terkait langsung kegiatan produksi yang dapat diperjualbelikan (*tradeable sector*) seyogiannya menjadi lokomotif kegiatan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi lebih banyak disokong sektor ekonomi yang tidak menghasilkan pertambahan produksi yang dapat diperdagangkan maka struktur ekonomi itu juga sudah lapuk. Celakanya, kinerja ekonomi yang mengilap sering tidak selalu beralas struktur ekonomi yang liat.

B. PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA

Indonesia terletak di posisi geografis antara benua Asia dan Eropa serta samudra Pasifik dan Hindia, sebuah posisi yang strategis dalam jalur pelayaran niaga antar benua. Salah satu jalan sutra, yaitu jalur sutra laut, ialah dari Tiongkok dan Indonesia, melalui selat Malaka ke India. Dari sini ada yang ke teluk Persia, melalui Suriah ke laut Tengah, ada yang ke laut Merah melalui Mesir dan sampai juga ke laut Tengah (Van Leur).

Perdagangan laut antara India, Tiongkok, dan Indonesia dimulai pada abad pertama sesudah masehi, demikian juga hubungan Indonesia dengan daerah-daerah di Barat (kekaisaran Romawi). Perdagangan di masa kerajaan-kerajaan tradisional disebut oleh Van Leur mempunyai sifat kapitalisme politik, dimana pengaruh raja-raja dalam perdagangan itu sangat besar. Misalnya di masa Sriwijaya, saat perdagangan internasional dari Asia Timur ke Asia Barat dan Eropa, mencapai zaman keemasannya. Raja-raja dan para bangsawan mendapatkan kekayaannya dari berbagai upeti dan pajak. Tak ada proteksi terhadap jenis produk tertentu, karena mereka justru diuntungkan oleh banyaknya kapal yang “mampir”.

Penggunaan uang yang berupa koin emas dan koin perak sudah dikenal di masa itu, namun pemakaian uang baru mulai dikenal di masa kerajaan-kerajaan Islam, misalnya picles yang terbuat dari timah di Cirebon. Namun, penggunaan uang masih terbatas, karena perdagangan barter banyak berlangsung dalam sistem perdagangan Internasional. Karenanya, tidak terjadi surplus atau defisit yang harus diimbangi dengan ekspor atau impor logam mulia.

Kejayaan suatu negara dinilai dari luasnya wilayah, penghasilan per tahun, dan ramainya pelabuhan. Hal itu disebabkan, kekuasaan dan kekayaan kerajaan-kerajaan di Sumatera bersumber dari perniagaan, sedangkan di Jawa, kedua hal itu bersumber dari pertanian dan perniagaan. Di masa prakolonial, pelayaran niagalah yang cenderung lebih dominan. Namun dapat dikatakan bahwa di Indonesia secara keseluruhan, pertanian dan perniagaan sangat berpengaruh dalam perkembangan perekonomian Indonesia, bahkan hingga saat ini.

Seusai masa kerajaan-kerajaan Islam, pembabakan perjalanan perekonomian Indonesia dapat dibagi dalam empat masa, yaitu masa sebelum kemerdekaan, orde lama, orde baru, dan masa reformasi.

1. Perkembangan Perekonomian Indonesia Sejak Orde Lama Hingga Era Reformasi

a. Pada Pemerintahan Orde Lama (Masa Demokrasi Terpimpin)

Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik, dan ekonomi (Mazhab Sosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia.

- 1) Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
- 2) Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-barang naik 400%.
- 3) Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1 sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000

kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.

Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat. Sekali lagi, ini juga salah satu konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, ekonomi, maupun bidang-bidang lain.

b. Pada pemerintahan Orde Baru

Maret 1966, Indonesia dalam era Orde Baru perhatian pemerintahan lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial tanah air. Usaha pemerintah tersebut ditambah lagi dengan penyusunan rencana pembangunan 5 tahun secara bertahap dengan target-target yang jelas sangat dihargai oleh negara-negara barat.

Tujuan jangka panjang dari pembangunan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses industrialisasi dalam skala besar. Perubahan ekonomi struktural juga sangat nyata selama masa Orde Baru, sektor industri manufaktur meningkat setiap tahun. Dan kondisi utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar suatu usaha membangun ekonomi dapat berjalan dengan baik, yaitu sebagai berikut: kemampuan politik yang kuat, stabilitas ekonomi dan politik, SDM yang lebih baik, sistem politik ekonomi terbuka yang berorientasi ke Barat, dan kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik.

c. Pada Pemerintahan Orde Reformasi

Pemerintahan presiden B. J. Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan

kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.

Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono: Kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan per kapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya *Indonesian Infrastructure Summit* pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.

Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salah satunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.

Pada pertengahan bulan Oktober 2006, Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Namun, wacana untuk berutang lagi pada luar negeri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sektor riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI) sehingga kinerja sektor riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja negara dan daya serap karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang

investor dari luar negeri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negeri masih kurang kondusif.

2. Pengaruh Globalisasi Pada Perekonomian Indonesia

Globalisasi merupakan proses di mana hubungan sosial dan saling ketergantungan antarnegara dan antarmanusia menjadi semakin tidak terbatas. Sedangkan menurut Selo Soemardjan, globalisasi adalah terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antarmasyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah yang sama. Globalisasi terjadi pada bidang informasi, ekonomi, serta budaya. Sudah sejak lama pemerintah Indonesia menggembar-gemborkan tentang globalisasi itu sendiri. Dengan harapan masyarakat dan pelaku industri siap menghadapi segala dampak dari globalisasi terutama pengaruh globalisasi pada perkembangan ekonomi Indonesia.

Pasar bebas merupakan salah satu bentuk nyata dari globalisasi ekonomi. Pengaruh dari globalisasi pada perkembangan ekonomi Indonesia di antaranya adalah tumbuhnya kreativitas para pelaku ekonomi Indonesia serta semakin mendunia produk - produk buatan Indonesia. Dengan adanya globalisasi, para pelaku ekonomi, memang dituntut untuk semakin kreatif menciptakan produk-produk yang tidak hanya mampu bersaing dengan sesama produk buatan dalam negeri, namun juga harus mampu bersaing dengan produk-produk dari negara lain. Tanpa adanya pengembangan produk, sudah pasti produk mereka tidak akan bisa laku di pasaran. Terlebih sejak CAFTA (*China Asia Free Trade Assosiation*) diberlakukan, barang - barang dari China mulai membanjiri pasar Indonesia. Tidak hanya bentuk serta tampilan produk yang menarik, namun juga harga yang ditawarkan sangat murah bila dibandingkan dengan produk - produk buatan Indonesia.

Sebenarnya banyak pihak yang menyayangkan mengapa Indonesia ikut menandatangani CAFTA. Tidak hanya karena dunia industri Indonesia dianggap belum siap menghadapi pengaruh globalisasi pada perkembangan ekonomi Indonesia, namun juga karena kondisi internal ekonomi Indonesia yang masih belum stabil. Namun, dengan alasan bahwa Indonesia akan menjadi negara yang jauh tertinggal dalam bidang ekonomi bila tidak turut serta dalam perjanjian CAFTA tersebut maka siap atau tidak, akhirnya Indonesia terlibat dalam pasar bebas Asia.

Bagi beberapa pelaku industri, terutama yang selama ini mengandalkan bahan baku impor dari China, malah menjadi pihak yang diuntungkan atas masuknya Indonesia ke dalam pasar bebas Asia. Mereka bisa mendapatkan

bahan baku dengan harga yang jauh lebih murah karena dilakukannya perjanjian penghapusan tarif impor sehingga bisa menekan banyak biaya yang harus mereka keluarkan. Dengan mendapatkan bahan baku yang murah, maka secara otomatis kegiatan industri bisa semakin berkembang. Itu merupakan contoh positif dari pengaruh globalisasi pada perkembangan ekonomi Indonesia.

3. Peranan UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Menurut Departemen Perindustrian (1993) UMKM didefinisikan sebagai perusahaan yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki total aset tidak lebih dari Rp 600 juta (di luar area perumahan dan perkebunan). Sedangkan definisi yang digunakan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) lebih mengarah pada skala usaha dan jumlah tenaga kerja yang diserap. Usaha kecil menggunakan kurang dari lima orang karyawan, sedangkan usaha skala menengah menyerap antara 5-19 tenaga kerja.

Ciri-ciri perusahaan kecil dan menengah di Indonesia, secara umum, adalah

- a. manajemen berdiri sendiri, dengan kata lain tidak ada pemisahan yang tegas antara pemilik dengan pengelola perusahaan. pemilik adalah sekaligus pengelola dalam UKM;
- b. modal disediakan oleh seorang pemilik atau sekelompok kecil pemilik modal;
- c. daerah operasinya umumnya lokal, walaupun terdapat juga UKM yang memiliki orientasi luar negeri, berupa ekspor ke negara-negara mitra perdagangan;
- d. ukuran perusahaan, baik dari segi total aset, jumlah karyawan, dan sarana prasarana yang kecil.

Pembangunan ekonomi hendaknya diarahkan pada sektor yang memberikan kontribusi terhadap *output* perekonomian yang tinggi dan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Peranan UMKM dalam penyerapan tenaga kerja yang lebih besar dari UB juga terlihat selama periode 2002 – 2005. UMKM memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja rata-rata sebesar 96,66% terhadap total keseluruhan tenaga kerja nasional sedangkan UB hanya memberikan kontribusi rata-rata 3,32% terhadap tenaga kerja nasional (tabel bawah). Tinggi kemampuan UKM dalam menciptakan kesempatan kerja dibanding usaha besar mengindikasikan bahwa UKM memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan dan dapat berfungsi sebagai katub pengaman permasalahan tenaga kerja (pengangguran).

Selanjutnya, dari aspek pembentukan PDB, secara umum UKM masih memberikan kontribusi lebih besar dibandingkan usaha besar lihat tabel. Selama periode 2002 -2005 secara total peranan UMKM masih di atas 50%, ini menunjukkan UKM masih memiliki peranan sangat penting dalam menciptakan nilai tambah. Namun demikian, dalam kurun waktu 3 tahun terlihat terjadi penurunan peran UKM dalam memberikan kontribusi terhadap total PDB, ini dapat memungkinkan mulai terjadinya pergeseran usaha kecil bergeser ke usaha menengah dan usaha menengah bergeser ke usaha besar. Pada skala usaha kecil dari 40,62% pada tahun 2002 menjadi 38,08% pada tahun 2005 pada skala usaha menengah dari 16,54% menjadi 16,13 persen sebaliknya peran usaha besar semakin bertambah dari 42,84 % pada tahun 2002 menjadi 45,78% pada tahun 2005. Mengenai peran UMKM akan dibahas lebih lanjut pada modul delapan.

C. CIRI NEGARA MAJU DAN BERKEMBANG

Menentukan suatu negara tergolong negara maju atau negara berkembang tidak hanya dipandang dari sudut pendapatan per kapita negara tersebut. Banyak faktor lain yang harus dipertimbangkan seperti pertumbuhan penduduk, tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, angka kelahiran dan kematian, angka harapan hidup, dan sebagainya.

1. Ciri-ciri Negara Maju

Negara maju dapat didefinisikan sebagai suatu negara yang memiliki tingkat kemakmuran penduduk yang cukup tinggi, jika dibandingkan dengan negara lainnya.

Berikut ini ciri-ciri negara maju.

- a. Sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor industri dan jasa.
- b. Pendapatan per kapitanya tinggi, yaitu di atas 10.000 US \$.
- c. Sektor pertanian dikelola secara intensif dan menggunakan alat- alat modern.
- d. Sumber daya manusianya berkualitas baik/tinggi.
- e. Pertumbuhan penduduk rendah yaitu 0,1% - 1% setiap tahunnya.
- f. Angka kelahiran dan angka kematian relatif rendah, sedangkan angka harapan hidup mencapai rata-rata di atas 67,5 tahun.
- g. Tingkat pendidikan dan keterampilan penduduknya tinggi.
- h. Konsentrasi penduduk banyak di perkotaan.

- i. Angka harapan hidup tinggi.
- j. Intensitas mobilitas tinggi.
- k. Tingkat kesehatan sudah baik.

Lebih kurang 20 negara maju di dunia termasuk dalam kategori negara Industri. Beberapa negara maju tergabung dalam salah satu forum kerja sama yang dikenal dengan nama G-8 (Group of Eight). Negara yang termasuk dalam kelompok G-8 adalah Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Kanada dan Rusia.

2. Ciri-ciri Negara Berkembang

Negara berkembang adalah negara yang memiliki tingkat pendapatan per kapita yang rendah. Hal ini yang menyebabkan negara- negara berkembang terus berusaha bergerak maju membangun negaranya dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan penduduknya.

Adapun ciri-ciri negara berkembang, adalah

- a. sebagian besar penduduk bekerja di bidang pertanian;
- b. pendapatan per kapita rendah yaitu di bawah 10.000 US \$;
- c. tingkat pertumbuhan penduduknya tinggi yaitu di atas 2 %;
- d. tingkat pengangguran sangat tinggi dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan;
- e. kualitas sumber daya manusianya rendah, sehingga penguasaan ilmu dan teknologi terhambat;
- f. pendidikan formal dan nonformal kurang memadai;
- g. ketergantungan terhadap negara maju sangat tinggi;
- h. mayoritas penduduk tinggal di pedesaan;
- i. kualitas hidup rendah.

Developing Eight (D-8) merupakan kelompok negara berkembang yang sebagian besar berpenduduk muslim. D-8 di bentuk pada 15 Juni 1997 di Istanbul Turki. Tujuan utama D-8, adalah meningkatkan posisi negara berkembang dalam perekonomian dunia dan menciptakan kesempatan baru dalam kerja sama perdagangan antar negara-negara anggotanya. Kedelapan negara berkembang tersebut adalah Indonesia, Turki, Iran, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, Nigeria, dan Mesir.

Selain negara maju dan negara berkembang, terdapat pula negara industri baru, yaitu negara yang perkembangan industrinya hampir sama dengan negara maju. Negara tersebut seperti Korea Selatan dan Singapura.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan apa yang dimaksud dengan struktur ekonomi Indonesia!
- 2) Uraikan perkembangan perekonomian Indonesia mulai dari pemerintahan orde lama sampai dengan pemerintahan orde reformasi!
- 3) Jelaskan mengenai ciri-ciri negara maju dan negara berkembang!

Petunjuk Jawaban Latihan

Anda diminta menjelaskan dengan ringkas dalam latihan ini dalam sebuah kertas kerja/buku catatan.



RANGKUMAN

Struktur ekonomi yang dikenal selama ini ada tiga yaitu agraris, industrial, dan jasa-jasa. Patokan yang menentukan suatu struktur ekonomi di antaranya, adalah jumlah penduduk yang berkecimpung dalam bidang tertentu (mata pencaharian). Apabila lebih dari 50% sebagian besar penduduk berkecimpung di bidang agraris maka struktur ekonomi tersebut adalah struktur ekonomi agraris, begitu juga dengan industrial atau jasa.

Sistem ekonomi dapat kita pandang pula sebagai sebuah sistem (sesuai dengan teori sistem) yang terdiri dari sejumlah subsistem yang lazim kita namakan lembaga-lembaga atau pranata ekonomi (*economic institutions*) yang apabila kita satukan merupakan sistem ekonomi. Struktur ekonomi Indonesia hingga dewasa ini masih menunjukkan ciri-ciri struktur agraris, di mana kurang lebih 2/3 penduduknya masih mencapai nafkah dari bidang pertanian. Kurang lebih tiga perempat dari jumlah penduduk Indonesia masih hidup di desa-desa.

Struktur ekonomi suatu negara dapat saja berubah dari satu masa ke masa lainnya, hal ini dapat dimungkinkan, menurut sejarah, terbukti pada

pelbagai negara yang dahulu memiliki struktur agraris dan dewasa ini memperlihatkan struktur industrial dan jasa-jasa. Contoh-contoh dalam sejarah seperti perkembangan dan perubahan struktur ekonomi Amerika Serikat, Belanda, Prancis, Jepang, dan Soviet Rusia merupakan bukti nyata.

Struktur ekonomi yang kokoh setidaknya ditopang dua fondasi yang kuat. *Pertama*, pada level mikro, relasi antarpelaku ekonomi berpadu padan dalam interaksi yang sejajar sehingga nisbah ekonomi dibagi secara proporsional sesuai dengan pengorbanan yang dipikul. *Kedua*, pada level makro, sektor ekonomi yang terkait langsung kegiatan produksi yang dapat diperjualbelikan (*tradeable sector*) seyogianya menjadi lokomotif kegiatan ekonomi.

Perkembangan perekonomian Indonesia selama ini sepanjang 3 orde kepemimpinan yaitu kepemimpinan orde lama, kepemimpinan orde baru dan perkembangan perekonomian pada masa kepemimpinan orde reformasi. Pada pemerintahan Orde Lama (Masa Demokrasi Terpimpin), sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik, dan ekonomi (Mazhab Sosialisme).

Pada Pemerintahan Orde Baru Maret 1966, Indonesia dalam era Orde Baru perhatian pemerintahan lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial tanah air. Usaha pemerintah tersebut ditambah lagi dengan penyusunan rencana pembangunan 5 tahun secara bertahap dengan target-target yang jelas sangat dihargai oleh negara-negara barat. Tujuan jangka panjang dari pembangunan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses industrialisasi dalam skala besar.

Pada pemerintahan orde reformasi, pemerintahan Presiden B.J. Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.

Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono: kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini di latar belakang oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Negara maju dapat didefinisikan sebagai suatu negara yang memiliki tingkat kemakmuran penduduk yang cukup tinggi, jika dibandingkan dengan negara lainnya. Negara berkembang adalah negara yang memiliki tingkat pendapatan per kapita yang rendah. Hal ini yang menyebabkan negara-negara berkembang terus berusaha bergerak maju membangun negaranya dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan penduduknya.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Struktur ekonomi yang dikenal selama ini, yaitu
 - A. industrial dan jasa-jasa
 - B. agraris dan jasa-jasa
 - C. agraris, industrial, dan jasa-jasa
 - D. agraris dan industrial

- 2) Struktur Ekonomi Indonesia hingga dewasa ini masih menunjukkan ciri-ciri struktur ekonomi
 - A. jasa-jasa
 - B. industrial
 - C. agraris dan industrial
 - D. agraris

- 3) Tujuan jangka panjang dari pembangunan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses....
 - A. industrialisasi dalam skala besar
 - B. industrialisasi dalam skala menengah
 - C. pemerataan distribusi pendapatan
 - D. pengurangan pengangguran melalui penyerapan tenaga kerja secara besar-besaran

- 4) Pemerintahan yang mengawali masa reformasi, belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Pada orde reformasi, Negara Indonesia sudah mengalami empat kali pergantian pemimpin (presiden). Presiden yang dalam kebijakan-kebijakannya mengutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik adalah
 - A. Susilo Bambang Yudhoyono
 - B. B. J. Habibie
 - C. Megawati Sukarno Putri
 - D. Abdurahman Wahid (Gusdur)

- 5) Suatu negara yang memiliki tingkat kemakmuran penduduk yang cukup tinggi, jika dibandingkan dengan negara lainnya adalah merupakan ciri negara....
 - A. besar
 - B. makmur
 - C. maju
 - D. berkembang

- 6) Salah satu ciri dari negara berkembang adalah sebagian besar penduduk bekerja di bidang
 - A. wiraswasta
 - B. buruh
 - C. serabutan
 - D. pertanian

- 7) Salah satu bukti Indonesia sudah mulai bergabung dalam pasar terbuka adalah dengan ikutnya Indonesia dalam penandatanganan
 - A. AFTA
 - B. FDI
 - C. CAFTA
 - D. semua salah

- 8) Pajak yang dikenakan terhadap laba yang berlimpah karena terjadinya perkembangan di bidang ekonomi dan perdagangan disebut
 - A. *windfall profit tax*
 - B. *transaction taxes*
 - C. *salary tax*
 - D. *consumption tax*

- 9) Di Irlandia Utara dikenal suatu jenis pajak yang disebut *Capital Acquisition Tax*, sedangkan yang dimaksud dengan *Capital Acquisition Tax* ialah
- pajak atas penghasilan
 - pajak atas hibah dan warisan
 - sejenis pajak pertambahan nilai
 - pajak atas tanah dan bangunan
- 10) Di Indonesia, *capital gain tax* termasuk ke dalam bagian pajak
- atas penghasilan
 - atas hibah dan warisan
 - pertambahan nilai
 - atas tanah dan bangunan

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) D. Salah satu hasil pemikiran kaum klasik telah memelopori pemikiran sistem perekonomian liberal. Dalam pemikiran kaum klasik bahwa perekonomian secara makro akan tumbuh dan berkembang apabila perekonomian diserahkan kepada pasar. Peran pemerintah terbatas kepada masalah penegakan hukum, menjaga keamanan dan pembangunan infrastruktur.
- 2) C. Sistem ekonomi sosialis dilandasi pada pemilikan bersama (kolektivitas) semua faktor produksi, sehingga hak milik dan inisiatif ekonomis individu kurang mendapat tempat yang layak.
- 3) B. John Maynard Keynes (1883-1946) berpendapat bahwa pandangan klasik yang memusatkan perhatian analisis ekonominya pada teori harga, maka perlu dipahami arah penggunaan alat produksi dengan sempurna. Dalam hubungan ini maka pengertian klasik diperluas kepada para ahli ekonomi yang tidak menganggap tidak mungkin adanya suatu pengangguran yang tidak dikehendaki (*involuntary unemployment*).
- 4) A. Tokoh-tokoh penganjur sosialisme utopia di antaranya adalah Thomas More (1478-1535), Tomasso Campanella (1568-1639), Francis Bacon (1560-1626), dan dikembangkan oleh Robert Owen (1771-1858), Charles Fourier (1772-1837), dan Louis Blanc (1811-1882).
- 5) A. Di kalangan para pelopor SEP terdapat dua cara pandang. *Pertama*, jalur yuridis formal, yang berangkat dari keyakinan bahwa landasan hukum SEP adalah Pasal 33 UUD 1945, yang dilatarbelakangi oleh jiwa Pembukaan UUD 1945 dan dilengkapi oleh Pasal 23, 27 ayat 2, 34, serta penjelasan Pasal 2 UUD 1945. Pelopor jalur ini, misalnya adalah Sri-Edi Swasono dan Potan Arif Harahap.
- 6) B. Secara umum, periodisasi ilmu ekonomi Islam ini dapat dibagi menjadi tiga tahap besar. *Pertama*, periode klasik ekonomi Islam, yang dimulai sejak misi kenabian Muhammad SAW hingga tahun 1500 M, tepatnya pada masa kejatuhan Andalusia. *Kedua*, periode stagnasi dan transisi, dimulai tahun 1500 M hingga 1950 M. *Ketiga*, periode resurgensi atau kebangkitan kembali, dimulai pada tahun 1950 M hingga sekarang.

- 7) C. Tujuan dari sistem ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu Negara.
- 8) D. *"SISTEM" . . . assemblage of objects arranged after some distinct method, usually logical or scientific; whole scheme of created things regarded as forming one complete whole; universe; organization; classification; set of doctrines or principles; the body as functional unity"* (Webster : 1969).
- 9) D. Sistem Ekonomi Indonesia sangat bergantung atau dipengaruhi oleh sistem politik yang tengah berkembang.
- 10) C. Ekonomi Pancasila berfungsi sebagai platform ekonomi yang memperjuangkan pemerataan dan moral kemanusiaan melalui upaya-upaya redistribusi pendapatan.

Tes Formatif 2

- 1) C. Struktur ekonomi yang dikenal selama ini ada tiga yaitu agraris, industrial, dan jasa-jasa.
- 2) D. Struktur ekonomi Indonesia hingga dewasa ini masih menunjukkan ciri-ciri struktur agraris, di mana kurang lebih 2/3 penduduknya masih mencapai nafkah dari bidang pertanian. Kurang lebih tiga perempat dari jumlah penduduk Indonesia masih hidup di desa-desa
- 3) A. Tujuan jangka panjang dari pembangunan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru, adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses industrialisasi dalam skala besar.
- 4) B. Pemerintahan presiden B. J. Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik.
- 5) C. Negara maju dapat didefinisikan sebagai suatu negara yang memiliki tingkat kemakmuran penduduk yang cukup tinggi, jika dibandingkan dengan negara lainnya.
- 6) D. Salah satu ciri dari negara berkembang adalah Sebagian besar penduduk bekerja di bidang pertanian.
- 7) C. Dengan adanya globalisasi, para pelaku ekonomi, memang dituntut untuk semakin kreatif menciptakan produk - produk yang tidak hanya mampu bersaing dengan sesama produk buatan dalam negeri, namun juga harus mampu bersaing dengan produk - produk dari negara lain. Tanpa adanya pengembangan produk, sudah pasti produk mereka tidak

akan bisa laku di pasaran. Terlebih sejak CAFTA (*China Asia Free Trade Assosiation*) diberlakukan, barang-barang dari China mulai membanjiri pasar Indonesia. Tidak hanya bentuk serta tampilan produk yang menarik, namun juga harga yang ditawarkan sangat murah bila dibandingkan dengan produk - produk buatan Indonesia.

- 8) B. *Windfall Profit Tax*, adalah pajak yang dikenakan terhadap laba yang berlimpah karena terjadinya perkembangan di bidang ekonomi dan perdagangan.
- 9) A. *Capital Acquisition Tax*, adalah suatu jenis pajak yang dipungut di Irlandia terhadap hibah dan warisan.
- 10) A. Di Indonesia, *capital gain tax* sudah termasuk dalam Pajak Penghasilan, yakni sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 Huruf d UU PPh 1994.

Daftar Pustaka

- Budiman, Arief. 1989. *Sistem Perekonomian Pancasila dan Ideologi Ilmu Sosial di Indonesia*.
- Choir. 2012. *Sejarah Lahirnya Sistem Ekonomi Sosialis*.
- Choir. 2012. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.
- Grossman, Gregory. 2004. *Sistem-sistem Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Gunadi, Tom. 1981. *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD 45*.
- Juditty, Rezka. 2011. *Sistem Ekonomi Indonesia*.
- Karim, Adimarwan. 2001. *Ekonomi Islam*.
- Lingawati, Dara. 2012. *Perkembangan Perekonomian Indonesia*.
- Mubyarto dan Budiono. 1981. *Ekonomi Pancasila*.
- Naftali, Yohan. 2007. *Teori Ekonomi Klasik*.
- Suandy, Edy. 2006. *Ekonomi Indonesia dari Sentralisasi ke Desentralisasi*. Yogyakarta: UII Press.
- Sudarsono, Heri. 2004. *Konsep Ekonomi Islam*.
- Swasono, Sri Edi. 1985. *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*.
- Ustadz Rich dan Laode. *Rasulullah's Business School*.
- Wibisono, Cristianto. *Anatomi Ekonomi Indonesia*.
- Winardi. 1977. *Pengantar Tentang Sistem-sistem Ekonomi*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Winardi. 1986. *Pengantar Tentang Teori Sistem dan Analisa Sistem*. Bandung: Penerbit Alumni.